



DINAS SOSIAL
Provinsi Jawa Tengah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



Jalan Pahlawan No. 12 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8311729
Faksimile 024-8450704 Laman <http://dinsos.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dinsos@jatengprov.go.id



EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan hasil kinerja Tahun 2023 atau tahun kelima merupakan tahun terakhir dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023.

Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Renja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah ditetapkan 3 tujuan dengan indikator kinerja yaitu:

1. Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan indikator Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dengan indikator Persentase Peningkatan kapasitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 366.484.983.000,- dengan realisasi sebesar Rp354.366.430.274,- tercapai sebesar (96,51 %).



Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah maka pelaksanaan program kegiatan mendasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja pada tahun 2023 melalui 7 (tujuh) program dengan didukung anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dan peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan perangkat daerah.

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target dan sasaran kinerja Dinas Sosial yaitu program rehabilitasi sosial dengan memberikan bantuan SOSH permakanan di LKS/LKSA dan rehabilitasi sosial dalam Panti Pemerintah, program perlindungan dan jaminan sosial melalui kegiatan pengangkatan anak, pengolahan data fakir miskin dan memberikan bantuan sosial PPKS non produktif (KJS, DBHCHT dan DID), program penanganan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dengan memfasilitasi pemulangan orang terlantar (OT), program pengelolaan taman makam pahlawan dalam bentuk penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial serta program pemberdayaan sosial melalui peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien sehingga Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki capaian kinerja sangat baik tidak terlepas dari komitmen seluruh jajaran baik struktural maupun pelaksana yang mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah, juga adanya dukung dari sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana yang efektif dan efisien.



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (Lkj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcome*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 - 2023 serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, Januari 2024.
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. IMAM MASKUR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690512 199401 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR DIAGRAM	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	2
1.3. Isu – Isu Strategis	11
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	12
1.5. Sistematika Penulisan	17
1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	18
1.7. Langkah Perbaikan Rekomendasi Internal OPD.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	23
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	33
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	38
2.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	52
3.2. Realisasi Anggaran.....	126
3.3. Inovasi.....	127
3.4. Penghargaan	130
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	137
4.2. Rekomendasi.....	140
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1	Sarana Prasarana	14
Tabel 1.4.2	Program dan Anggaran APBD	16
Tabel 1.6	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	17
Tabel 2.1.1	Tujuan Dan Sasaran Renstra 2018 - 2023	32
Tabel 2.2.1	Rencana Kinerja Tahun 2023.....	34
Tabel 2.2.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	35
Tabel 2.3.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	39
Tabel 2.3.2	Program dan Anggaran APBD Tahun 2023.....	41
Tabel 3.1.1	Skala Pengukuran Kinerja LKJiP	53
Tabel 3.1.2	Capaian Kinerja Tahun 2023.....	54
Tabel 3.1.3	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	56
Tabel 3.1.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023.....	100
Tabel 3.1.5	Realisasi Kinerja dan Target Renstra	103
Tabel 3.1.6	Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Alternatif Solusi	108
Tabel 3.1.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	114
Tabel 3.1.8	Program Yg Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan	117
Tabel 3.1.9	Realisasi Anggaran	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1	Cascading Dinas Sosial Permendagri No. 90 Tahun 2019	2
Gambar 1.2.2	Peta Proses Bisnis Dinas Sosial	5
Gambar 1.2.3	Peta Relasi Dinas Sosial	6
Gambar 1.2.4	Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.....	9

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.4.1	SDM Menurut Jabatan Secara Umum.....	13
Diagram 1.4.2	SDM Menurut Tingkat Pendidikan.....	13
Diagram 1.4.3	SDM Menurut Golongan.....	14
Diagram 1.4.4	SDM Menurut Jenis Kelamin.....	15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Grafik Penduduk Miskin Jawa Tengah Juni Tahun 2022.....	29
Grafik 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Penurunan PPKS	104
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Peningkatan PSKS.....	105
Grafik 3.3	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Peningkatan Tata Kelola	106
Grafik 3.4	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah.....	107



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional turut mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi baik yang bersifat primer maupun dampak non sosial.

Dalam rangka menjawab perkembangan sosial politik masyarakat yang terus berjalan dan sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan di era otonomi daerah, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang mengamanatkan bahwa adanya penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisiensi, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum, maka pergub tersebut menggantikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Agar mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), berdasarkan



Tujuan 1. Menurunkan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dengan sasaran Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani, bidang dan program yang mendukung antara lain :

1.2.1. Bidang Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial :

- a. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti,
- b. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti,
- c. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti,
- d. Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di dalam panti,
- e. Kegiatan pengangkatan anak kantar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

1.2.2 Bidang Penanganan Fakir Miskin

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial :

- Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi.

1.2.3 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dan Program Penanganan Bencana :

- a. Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi,
- b. Kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal,
- c. Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi.



Tujuan 2. Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dengan sasaran Meningkatnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bidang dan program yang mendukung antara lain :

1.2.4 Bidang Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Pahlawan :

- a. Kegiatan peningkatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial,
- b. Kegiatan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial,
- c. Kegiatan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Tujuan 3. Meningkatnya tata Kelola Perangkat Daerah, dengan sasaran 1). meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, bidang dan program yang mendukungnya :

1.2.5 Sekretariat

Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah :

- a. Kegiatan perencanaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan evaluasi Perangkat Daerah

2). meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah, bidang dan program yang mendukungnya :

1.2.6 Sekretariat

Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah :

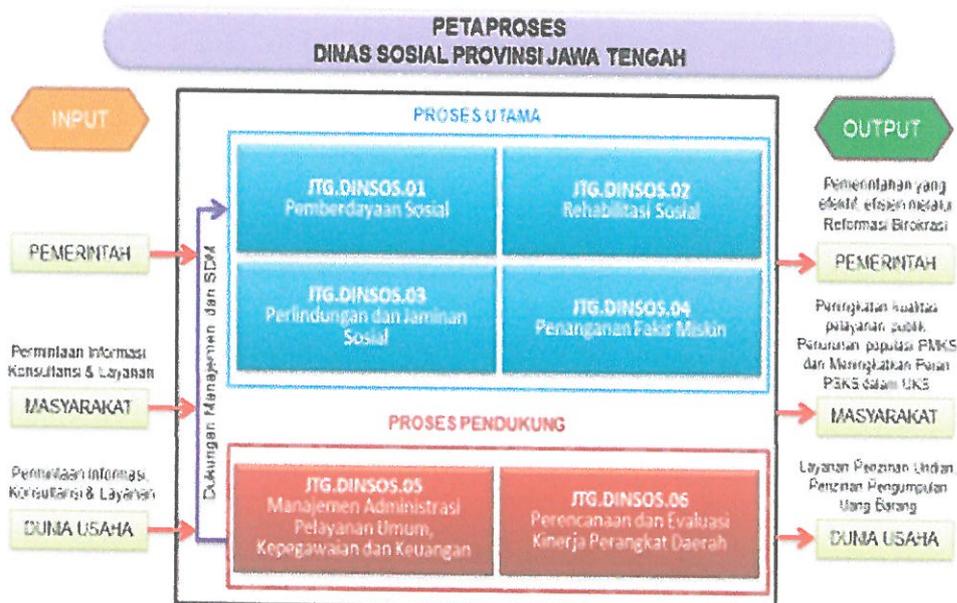
1. Kegiatan pelaporan gaji dan tunjangan ASN,
2. Kegiatan pelaporan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN,
3. Kegiatan pelaporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan,
4. Kegiatan pelaporan keuangan bulanan/triwulan/ semester,
5. Kegiatan administrasi kepegawaian,



6. Kegiatan administrasi umum,
7. Kegiatan penyediaan jasa,
8. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah,
9. Kegiatan pengadaan barang milik daerah,

Dalam rangka melaksanakan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Peta Proses Bisnis sebagai acuan bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antara instansi dan unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Peta Proses Bisnis dan Peta Relasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.2.2
Peta Proses Bisnis Dinas Sosial





Gambar 1.2.3
Peta Relasi Dinas Sosial



Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, membawahkan:
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional terbagi 3 (tiga) Sub Koordinator :
 - Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial;



- Sub Koordinator Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
- Sub Koordinator Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

Masing-masing Sub Koordinator dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- d. Bidang Rehabilitasi Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional terbagi 3 (tiga) Sub Koordinator :

- Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Masing-masing Sub Koordinator dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional terbagi 3 (tiga) Sub Koordinator:

- Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
- Sub Koordinator Jaminan Sosial.

Masing-masing Sub Koordinator dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional terbagi 3 (tiga) Sub Koordinator :



- Sub Koordinator Pengelolaan Data Kemiskinan;
- Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin Perdesaan; dan
- Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan.

Masing-masing Sub Koordinator dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

g. UPT

Masing-masing UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Terdapat 20 Panti Pelayanan Sosial (UPT) Type A dan 7 Panti Pelayanan Sosial (UPT) Type B yang tersebar di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

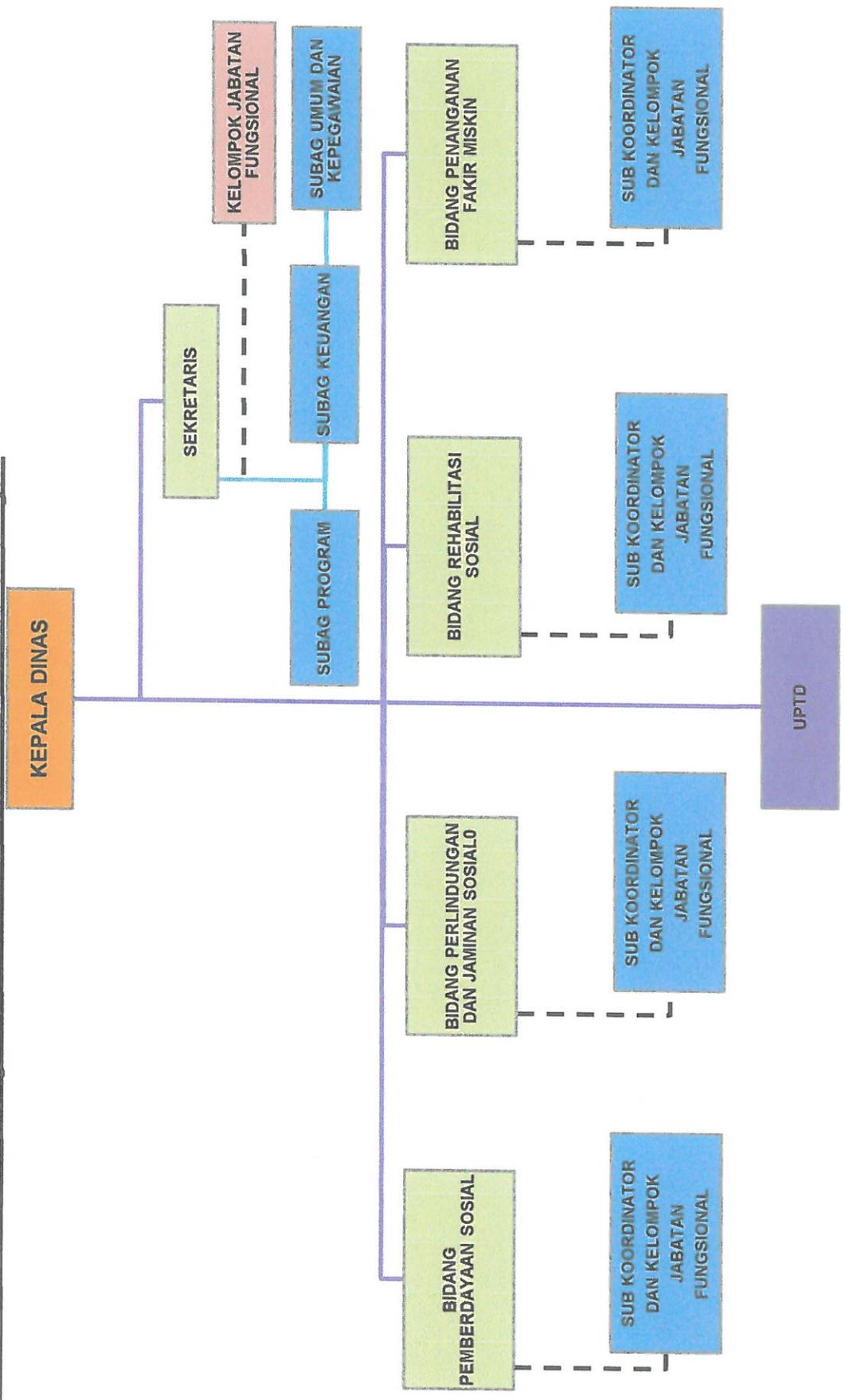
Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional yang ada dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, adalah:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

Struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.2.4 sebagai berikut :



Gambar 1.2.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah





1.3 Isu - Isu Strategis

Isu strategis pembangunan sebagaimana Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0017747 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023, kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”.

Mendasar pada tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah :

- 1.3.1 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran melalui pengelolaan dan penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penyediaan *basic needs acces* dengan menyelenggarakan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- 1.3.2 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup serta kapasitas SDM berdaya saing melalui peningkatan kemandirian fakir miskin dengan pembentukan embrional Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan sosial KUBE fakir miskin.

Guna mendukung prioritas pembangunan Jawa Tengah dalam percepatan pengurangan kemiskinan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai strategi antara lain :

1. Penanganan fakir miskin, meliputi :
 - a. Verifikasi, validasi dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu sebagai dasar penyusunan strategi penanganan fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya,
 - b. Penanganan Fakir Miskin berbasis kewilayahan dan kelompok.



2. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial PPKS melalui Pantii Pelayanan Sosial.
3. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi korban bencana alam bencana sosial dan jaminan sosial bagi PPKS Non Produktif.
4. Pemberdayaan Sosial potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam upaya meningkatkan peran dalam melaksanakan kesejahteraan sosial (UKS).

1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

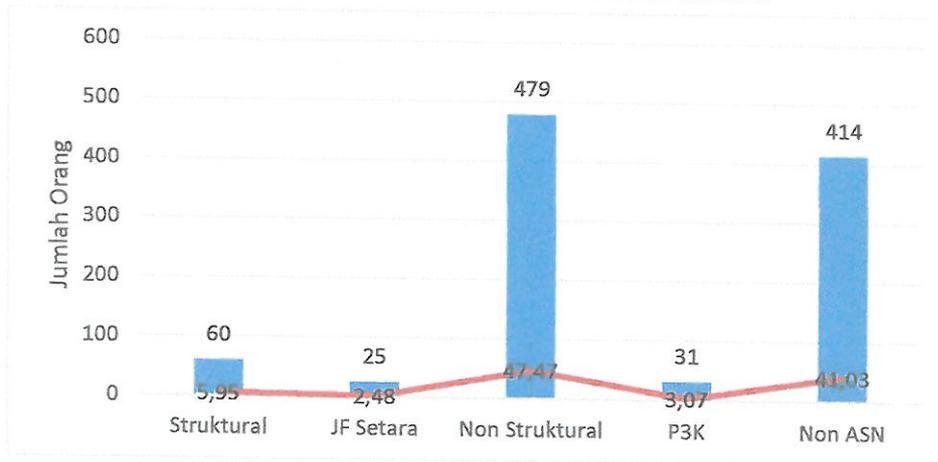
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berjumlah 1.009 orang. Data dukung sumber daya manusia berdasarkan klarifikasi jabatan, pendidikan, golongan dan jenis kelamin per 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam tabel dan diagram dibawah ini :

➤ Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1.	Struktural	60	5,95 %
2.	JF Setara	25	2,48%
3.	Non Struktural	479	47,47 %
4.	P3K	31	3,07 %
5.	Non ASN	414	41,03 %



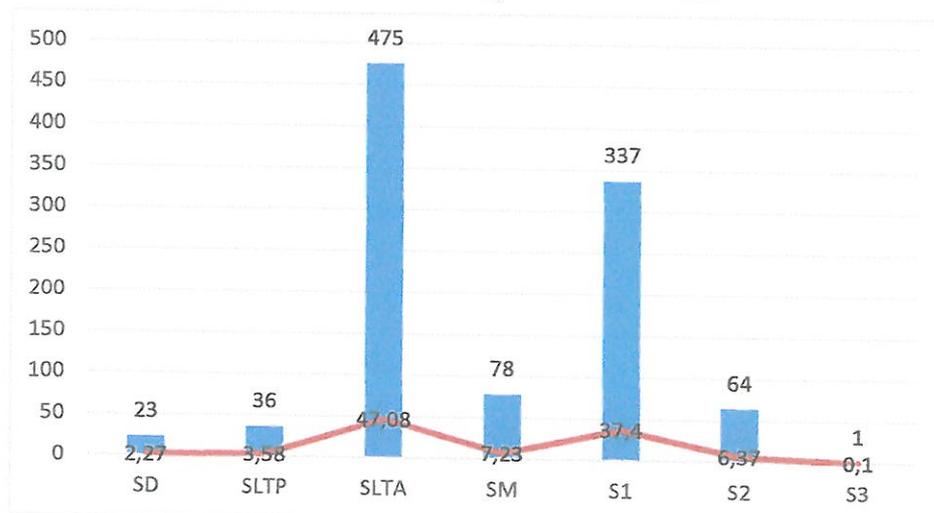
Diagram 1.4.1
SDM Menurut Jabatan Secara Umum



➤ Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	23	2,27 %
2.	SLTP	36	3,58 %
3.	SLTA	475	47,08 %
4.	SM	78	7,23 %
5.	S1	337	37,40 %
6.	S2	64	6,37 %
7.	S3	1	0,10 %

Diagram 1.4.2
SDM Menurut Tingkat Pendidikan

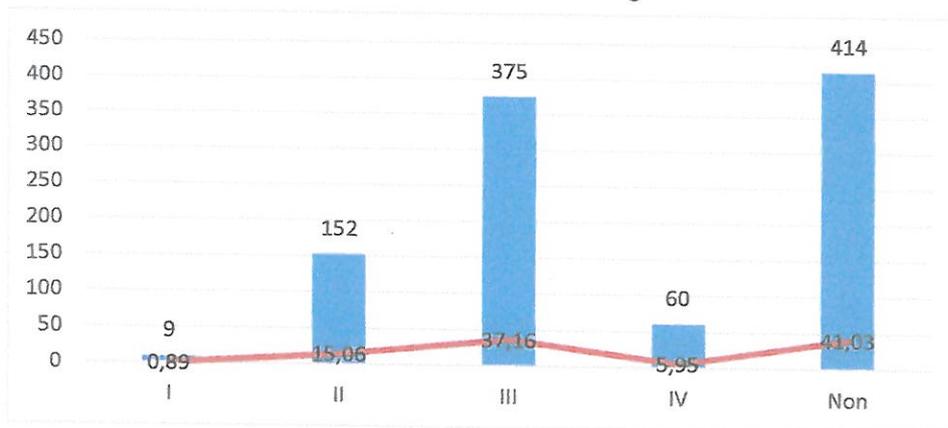




➤ **Golongan**

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	I	9	0,89 %
2.	II	152	15,06 %
3.	III	375	37,16 %
4.	IV	60	5,95 %
5.	Non ASN	414	41,03 %

Diagram 1.4.3
SDM Menurut Golongan

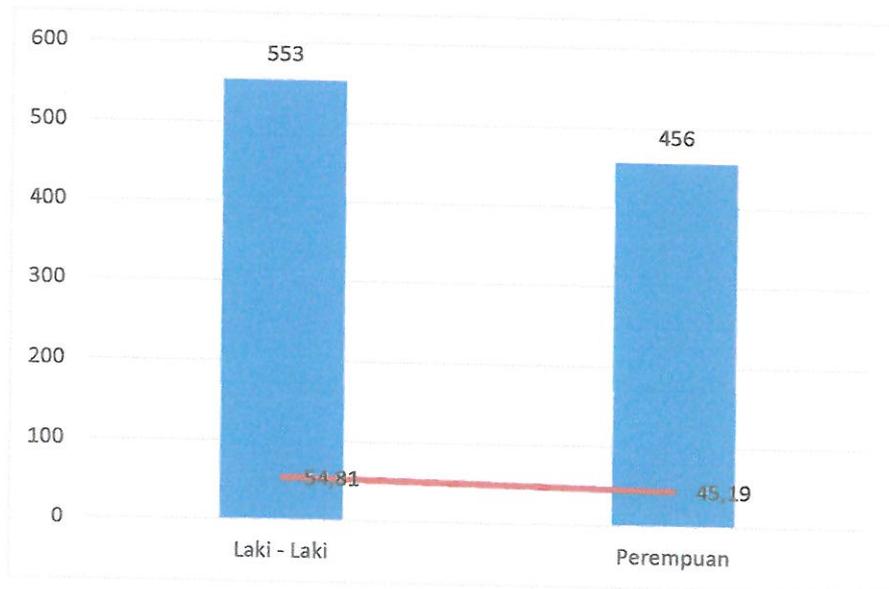


➤ **Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	553	54.81 %
2.	Perempuan	456	45,19 %



Diagram 1.4.4
SDM Menurut Jenis Kelamin



Guna mendukung tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari:

Tabel 1.4.1
Sarana Prasarana

No	Uraian		Tahun 2023	
			Jumlah	Harga
1	2		3	4
1.	1.3.1.01	Tanah	89	133.215.529.940
2.	1.3.2.01	Alat Besar	33	1.522.137.298
3.	1.3.2.02	Alat Angkutan	254	17.495.709.411
4.	1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	111	403.490.300
5.	1.3.2.04	Alat Pertanian	3	15.485.000
6.	1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.562	23.051.844.966
7.	1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	124	515.649.784
8.	1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	264	949.452.321
9.	1.3.2.08	Alat Laboratorium	11	95.285.000



No	Uraian	Tahun 2023		
		Jumlah	Harga	
10.	1.3.2.09	Alat Persenjataan	-	-
11.	1.3.2.10	Alat komputer	874	6.774.556.846
12.	1.3.2.11	Alat Eksplorasi	-	-
13.	1.3.2.12	Alat Pengeboran	-	-
14.	1.3.2.13	Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian	-	-
15.	1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
16.	1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	-	-
17.	1.3.2.16	Alat Peraga	37	297.815.000
18.	1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	-	-
19.	1.3.2.18	Rambu-Rambu	-	-
20.	1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	20	54.495.000
21.	1.3.3.01	Bangunan Gedung	776	189.590.654.931
22.	1.3.3.02	Monumen	2	32.619.000
23.	1.3.3.03	Bangunan Menara	-	-
24.	1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	14	3.027.920.500
25.	1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	3	52.859.000
26.	1.3.4.02	Bangunan Air	37	3.267.301.569
27.	1.3.4.03	Instalasi	2	25.000.000
28.	1.3.4.04	Jaringan	1	500.000
29.	1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	8.263	418.871.600
30.	1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	218	672.712.135
31.	1.3.5.03	Hewan	-	-
32.	1.3.5.04	Biota Perairan	-	-
33.	1.3.5.05	Tanaman	-	-
34.	1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-
35.	1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
36.	1.3.6.01	Kontruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah			20.698	381.479.889.601



Besaran anggaran untuk melaksanakan tupoksi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang tertera dalam APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 366.484.983.000,- (Tiga ratus enam puluh enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) untuk mendanai 7 program kegiatan, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.4.2
Program dan Anggaran APBD

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.390.494.000	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	7.529.040.000	APBD
3.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	432.000.000	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	52.968.104.000	APBD
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	176.974.857.000	APBD
6.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	75.000.000	APBD
7.	Program Penanganan Bencana	2.115.488.000	APBD

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan latar belakang, mandat kinerja, peta proses bisnis, struktur organisasi, isu-isu strategis, dukungan SDM, sarana prasarana dan anggaran, sistematika penulisan, tindaklanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 serta langkah-langkah perbaikan rekomendasi.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan ringkasan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja OPD, strategi dan arahan kebijakan, struktur program dan kegiatan tahun 2023, perjanjian kinerja tahun 2023 serta instrumen pendukung capaian kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi tahun 2023, efisiensi anggaran, inovasi dan penghargaan.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi tahun 2023 serta rekomendasi di masa mendatang untuk peningkatan kinerja.

1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tindaklanjut hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2023 hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Sosial dengan nomor LHP: 700/1660/WI/2023 tanggal 21 Agustus 2023, telah diserahkan berkas dan tindaklanjutnya ke bagian Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 September 2023. Tindaklanjut hasil evaluasi SAKIP tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

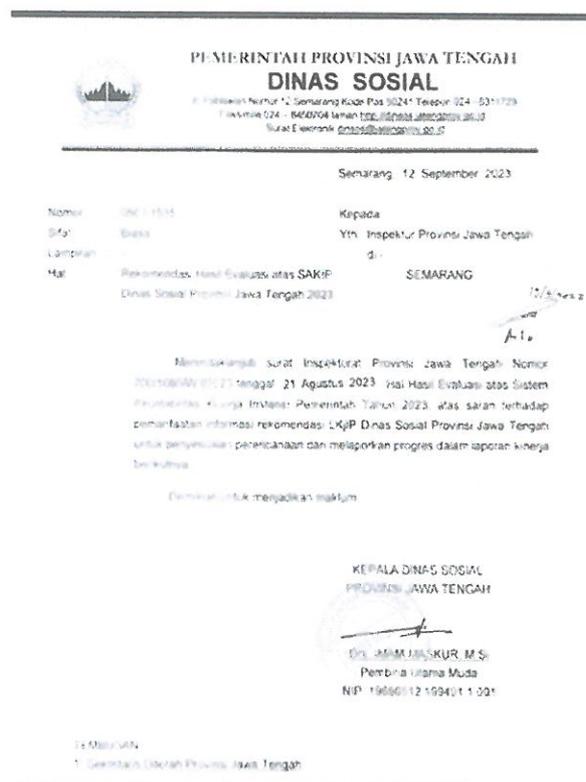
Tabel 1.6
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

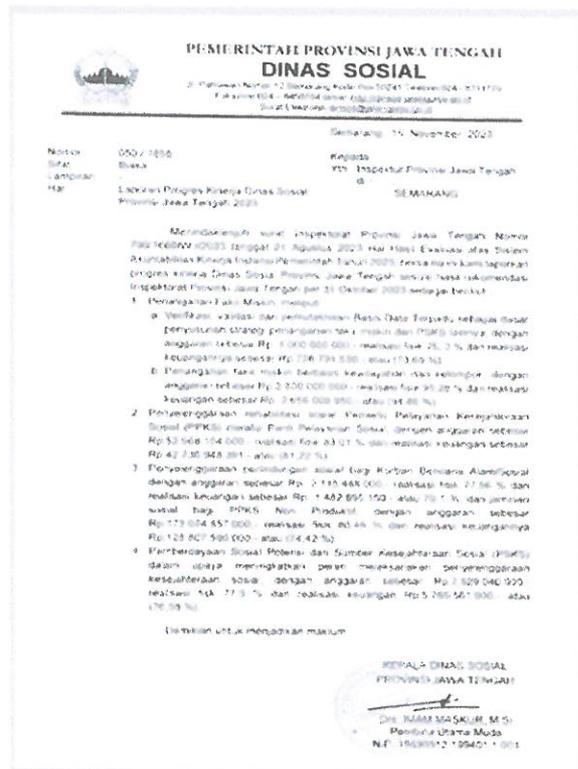
No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Memanfaatkan informasi rekomendasi dalam LKjIP untuk menyesuaikan perencanaan aktivitas dan melaporkan progres pelaksanaan	1. Surat kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah, tanggal 12 September 2023, nomor : 050/1535 hal : Rekomendasi Hasil Evaluasi atas SAKIP Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.



<p>rekomendasi dalam laporan kinerja periode berikutnya.</p>	<p>2. Surat kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah, tanggal 15 November 2023, Nomor : 050/1856 hal : Laporan Progres Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023</p>
--	--

Dokumen Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 :





1.7 Langkah Perbaikan Rekomendasi Internal OPD

1.7.1 Penanganan Fakir Miskin, meliputi :

- a. Inovasi dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan data kemiskinan di Jawa Tengah melalui inisiasi inovasi SIK-DJ V2 modul DT Jateng, merupakan modul yang dikembangkan sebagai respon inisiatif terhadap dinamika DTKS yang tidak lagi dilengkapi pemeringkatan kesejahteraan sosial dan variabel data kemiskinan yang secara teknis dilakukan verifikasi melalui DT Jateng dengan sumber data DTKS, penetapan pada bulan Oktober 2020 dan telah disinkronkan dengan DTKS penetapan bulan Februari 2022.
- b. Melakukan koordinasi lintas sectoral dalam rangka meningkatkan pemahaman pemerintah daerah akan pentingnya pemutakhiran data fakir miskin cakupan wilayah provinsi sebagai dasar penajaman sasaran program penanggulangan kemiskinan.



- c. Meningkatkan kesadaran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perbaikan data melalui proses pemutahiran data fakir miskin cakupan wilayah provinsi di 35 Kabupaten/Kota.
- 1.7.2 Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial, meliputi :
- a. Meningkatkan pelayanan dasar kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam panti melalui program rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Jawa Tengah Bidang Sosial dengan target capaian sebesar 100 %.
 - b. Mendasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat urusan pemerintahan *kongkuren* yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, sebagai representasi pemerintahan pusat yang ada di daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dan kolaborasi sesuai kewenangan di bidang sosial yaitu dengan mendorong kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk membangun rumah singgah sosial, karena belum semua Kabupaten/Kota mempunyai rumah singgah.
- 1.7.3. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam/Sosial dan Jaminan Sosial bagi PPKS Non Produktif dilaksanakan melalui strategi peningkatan indek bantuan Program Kartu Jateng Sejahtera, yang semula Rp. 250.000,- per bulan menjadi Rp.370.000,- per bulan sebagai respon terhadap basis perhitungan *Purchasing Power Parities* (PPP) / Hitungan Paritas Daya Beli, langkah ini dilakukan agar PPKS Non Produktif tidak masuk dalam katagori miskin kembali.



1.7.4. Pemberdayaan Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya meningkatkan peran melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dilakukan melalui :

- a. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi PSKS dalam rangka peningkatan kapasitas, kapabilitas dan jejaring kerja PSKS dalam penanganan PPKS dengan melalui pendekatan pekerjaan sosial.
- b. Melakukan sertifikasi PSKS melalui fasilitasi dan koordinasi dengan kementerian sosial.
- c. Mendorong dan melibatkan dunia usaha secara aktif terlibat langsung dalam penanganan PPKS dan pemberdayaan PPKS (melaksanakan *Corporate Social Responsibility / CSR*) bidang kesejahteraan sosial diwilayahnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum dan di dalamnya mencakup pengembangan misi organisasi, serta tujuan-tujuan pokok yang akan dicapai organisasi secara keseluruhan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 - 2023.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2023 merupakan tahun ke 5 (lima) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan prioritas pembangunan pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran terutama dalam kemudahan akses kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat kurang mampu yang berfokus pada upaya validasi perbaikan data penduduk miskin, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dalam panti dan peran serta masyarakat agar PPKS memiliki kapasitas kemandirian, pemberian jaminan bantuan sosial bagi fakir miskin non produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) serta perluasan pendampingan desa miskin.



2.1.1 Visi

Visi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun dalam kurun waktu 2018-2023 adalah **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI** “*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”.

2.1.2 Misi

Visi Jawa Tengah tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu :

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Memperluas kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan
- d. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Dari visi dan misi diatas, maka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan kesejahteraan sosial akan mendukung pencapaian visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan mewujudkan **misi c** yaitu dengan dukungan untuk memperluas kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dan implementasi dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tahun 2018 - 2023 mengarah kepada 3 (tiga) hal pokok, yakni:

1. Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Secara teknis pembangunan jangka menengah tahun 2018 - 2023 dijabarkan melalui 4 (empat) Bidang Teknis dan Sekretariat, dengan tujuan sebagaimana berikut :

1) Bidang Rehabilitasi Sosial.

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial PPKS.

Tujuan :

- a) Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar.
- b) Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- c) Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

2) Bidang Pemberdayaan Sosial.

Meningkatkan kualitas pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Tujuan :

- a) Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
- b) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, undian dan jaminan sosial.



- c) Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
 - d) Meningkatkan jiwa keprintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.
- 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.
Tujuan :
- a) Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana Alam.
 - b) Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana Sosial.
 - c) Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan jaminan sosial perorangan dan keluarga.
- 4) Bidang Penanganan Fakir Miskin :
- a) Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan data Kemiskinan dan PPKS lainnya.
 - b) Meningkatnya kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin Perdesaan.
 - c) Meningkatnya kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan.
- 5) Sekretariat :
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Tujuan :
- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan



kesejahteraan sosial.

- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c) Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.

b. Sasaran

Sasaran dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2018 - 2023 adalah meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dan meningkatnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta meningkatnya akuntabilitas kinerja dan meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, melalui :

- 1) Penanganan PPKS adalah kembalinya keberfungsian sosial PPKS yang diindikasikan sebagai berikut :
 - a) Kemampuan mengenal diri sendiri,
 - b) Kemampuan rawat diri,
 - c) Kemampuan mengenali masalah,
 - d) Kemampuan memecahkan masalah,
 - e) Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar,
 - f) Kemampuan menjalankan peran-peran sosial.
- 2) Penguatan Kapasitas PSKS adalah meningkatnya peran PSKS dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yang diindikasikan dengan kemampuan dan keikutsertaan (partisipasi aktif) dalam memberikan dukungan layanan kesejahteraan sosial yang sedang dan telah

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

- 3) Peningkatan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah adalah meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat secara umum dengan mengutamakan dari aspek penganggaran, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan secara transparan, sehingga tercipta suatu penilaian publik yang *Good Governance* kepada organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan pada masyarakat.

Secara operasional penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

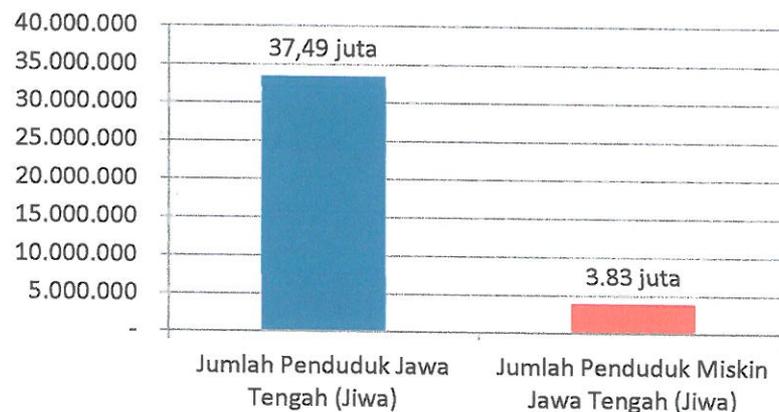
- a) Meningkatnya Keberfungsian Sosial PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui Panti Pelayanan Sosial. Kualitas pelayanan sosial adalah standar absolut yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan dalam panti, sehingga dapat mendukung percepatan pemulihan keberfungsian sosial PPKS, baik dalam kualitas aspek fisik (sarana dan prasarana) maupun kualitas SDM serta kualitas pelayanan, dengan sasaran:
 - 1). Pelayanan sosial melalui Panti Sosial Pemerintah.
 - 2). Dukungan operasional terhadap Panti Sosial Swasta melalui subsidi permakanan satu orang satu hari (SOSH).
 - b) Meningkatnya keberfungsian sosial fakir miskin.
Keberfungsian sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Fakir
-



Miskin adalah suatu kondisi yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memecahkan masalah yang dihadapi serta kemampuan untuk menjalankan peran-peran sosial dalam berkehidupan.

Menurut data BPS Jawa Tengah pada kuartal pertama Tahun 2022 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa Tengah mencapai 3,83 juta jiwa (10,93 %) dari jumlah penduduk Jawa Tengah 37,49 juta jiwa.

Grafik 2.1
Grafik Penduduk Miskin Jawa Tengah
Juni Tahun 2022



Adanya perbedaan karakteristik antara masyarakat perkotaan dan perdesaan, sehingga diperlukan strategi dan pendekatan penanganan fakir miskin dengan mengembangkan kearifan lokal. Basis data terpadu (BDT) program penanganan fakir miskin menjadi dasar acuan dalam penanganan fakir miskin. Upaya peningkatan keberfungsian sosial fakir miskin dilaksanakan melalui kegiatan :



- 1). Pengelolaan data kemiskinan,
 - 2). Penanganan fakir miskin perdesaan,
 - 3). Penanganan fakir miskin perkotaan.
- a. Tersedianya sistem Jaminan Sosial PPKS Non Produktif dan Perlindungan Sosial Korban Bencana. Jaminan kesejahteraan sosial melekat sebagai “*State Obligation*” yang dilaksanakan untuk kepentingan seluruh rakyat, terutama bagi warga yang tidak mampu atau miskin dan mengalami masalah kesejahteraan sosial. Jaminan sosial ditujukan kepada warga masyarakat baik perorangan, keluarga, kelompok maupun komunitas tertentu yang mengalami hambatan fungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengalami resiko ketidakpastian hidupnya, yang berpotensi berpengaruh terhadap penurunan taraf kesejahteraan sosial atau hidup di bawah garis kemiskinan.
- Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana (erupsi, tanah longsor, gas beracun, angin puting beliung, banjir dan tsunami) maka pengurangan resiko bencana (PRB) menjadi salah satu prioritas utama dalam penanganan bagi korban bencana dengan memperkuat sistem dan mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu berbasis masyarakat / *community Disaster Managemen* (CDM), serta kegiatan tanggap darurat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial. Jaminan sosial PPKS non produktif dan perlindungan sosial korban bencana dilaksanakan melalui kegiatan:
- 1). Perlindungan sosial korban bencana alam,
 - 2). Perlindungan sosial korban bencana sosial,



- 3). Jaminan sosial PPKS non produktif.
- b. Meningkatnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sebagai wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, merupakan infrastruktur penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang perlu distimulus secara kontinyu mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Upaya peningkatan peran PSKS dilaksanakan melalui kegiatan:
- 1) Kegiatan penguatan kapasitas PSKS,
 - 2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial,
 - 3) Kegiatan keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
- c. Meningkatnya tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah, terdapat 2 sasaran yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan keluaran nilai SAKIP Dinas Sosial melalui kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan keluaran nilai indek kepuasan masyarakat melalui kegiatan :
- 1) Administrasi keuangan Perangkat Daerah,
 - 2) Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah,
 - 3) Administrasi umum Perangkat Daerah,
 - 4) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah,
 - 5) Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah



Daerah,

- 6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai Implementasi Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tahun 2018 - 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.1
Tujuan Dan Sasaran Renstra 2018 - 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	0,47	0,95	1,42	1,9	2,37
		Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang ditangani	Persentase PPKS ditangani yang meningkat kesejahteraannya	%	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		Persentase peningkatan kapasitas bagi PSKS	%	6,88	11,99	15,84	25,74	34,38
		Meningkatnya kemampuan PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya setelah mendapatkan penguatan	%	100	100	100	100	100



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		penyelenggaraan kesejahteraan sosial	kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						
3	Meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	N	77	77	78	87	88
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N	70	70	77	79	80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	N	77	77	78	87	88

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang akan dicapai pada tahun 2023.

Pada dasarnya RKT 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat program kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja yang akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan Dinas Sosial



dalam mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1
Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	2,37
		Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang ditangani	Persentase PPKS ditangani yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	100
2.	Meningkatkan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		Persentase peningkatan kapasitas bagi PSKS	%	34,38
		Meningkatnya kemampuan PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya setelah mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100
3.	Meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	N	88



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
	Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N	80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	N	88

Sedangkan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai keberhasilan sasaran dan program yang akan dicapai dalam tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang ditangani	1) Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan difokuskan pada kegiatan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan, 2) Program rehabilitasi sosial difokuskan pada kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar PPKS terlantar dalam panti dan diarahkan pada persentase peningkatan	1) Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana dengan peningkatan kapasitas Tagana dalam tanggap darurat keterjadian bencana skala provinsi, 2) Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan



NO	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
		<p>pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan keberfungsian sosial PPKS terlantar dalam panti.</p> <p>3) Program perlindungan dan jaminan sosial difokuskan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, meliputi :</p> <p>a. Bantuan Kelompok Usaha Bersana (KUBE) fakir miskin dengan memberikan bimbingan sosial dan motivasi terhadap keluarga fakir miskin wilayah I dan II cakupan daerah provinsi yang mendapatkan penanganan,</p> <p>b. Ketersediaan data fakir miskin yang telah tervalidasi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIK DJ V2) di 35 Kabupaten/Kota,</p>	<p>pengangguran melalui pengelolaan dan penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penyediaan <i>basic need access</i> dengan penyelenggaraan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan pemenuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar di dalam panti.</p> <p>3) Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menuju SDM berdaya saing melalui peningkatan kemandirian fakir miskin dengan pembentukan embryonal KUBE</p>



NO	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
		<p>c. Perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS Non Produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan sasaran 12.764 orang.</p> <p>4) Program penanganan bencana difokuskan kegiatan penanganan korban bencana pada saat dan pasca kejadian bencana provinsi melalui pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana masa tanggap darurat, pendampingan psikososial korban bencana dan bantuan pemulangan orang terlantar.</p>	
2.	Meningkatnya kemampuan PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1) Program pemberdayaan sosial difokuskan pada kegiatan penguatan kapasitas PSKS dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial dan diarahkan pada peningkatan persentase peran PSKS dalam melaksanakan UKS melalui peningkatan kapasitas PSKS kelembagaan, TKSK	



NO	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
		dan penyuluhan sosial, 2) Program pengelolaan taman makam pahlawan difokuskan pada kegiatan pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi.	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada capaian output tetapi termasuk kinerja outcome yang berkesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.



2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2023, secara lengkap tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	2,37
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ditangani yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	100
2.	Meningkatkan peran Potensi Sumber	Persentase peningkatan kapasitas bagi	%	34,38



NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		
	Meningkatnya kemampuan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya setelah mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100
3.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	N	88
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N	80
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	N	88

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Sosial pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini yang telah melaksanakan 7 program dengan di dukung oleh anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Rp. 366.484.983.000,- (tiga ratus enam puluh enam milyar



empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.2
Program dan Anggaran APBD Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	126.390.494.000
2.	Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	34,38 %	7.529.040.000
3.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	100 %	432.000.000
4.	Rehabilitasi Sosial	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti	2,37 %	52.968.104.000
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan	8,21 %	176.974.857.000
6.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100 %	75.000.000



NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
7.	Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan	100 %	2.115.488.000

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

➤ e-Plainning

Sistem yang digunakan untuk perencanaan daerah (OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).

The screenshot shows the 'Dashboard Pagu & RAB Belanja' interface. It includes a sidebar menu with options like 'Dashboard', 'Kategori Rango', 'Komponen Rango Perubahan', 'Upload Dokumen', 'Upload Dokumen Penilaian', 'Cetak', and 'Cetak Perubahan'. The main content area displays a search bar and a table with the following data:

Kode	Organisasi	Pagu AMD (Rp)	Total RAB (Rp)	Pagu Kinerja (Rp)	Status
100.0	Dinas Sosial	16.872.820.000	16.872.820.000	16.872.820.000	OK
100.0.000	Tidung Pembinaan Sosial	7.391.242.000	7.391.242.000	7.391.242.000	OK
100.0.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial	6.315.000.000	6.315.000.000	6.315.000.000	OK

➤ e-Budgeting

Sistem yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran daerah dengan tujuan memberikan panduan dalam proses penyusunan APBD.



E-Contracting 2023

Printed: 1 Tahun

REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023

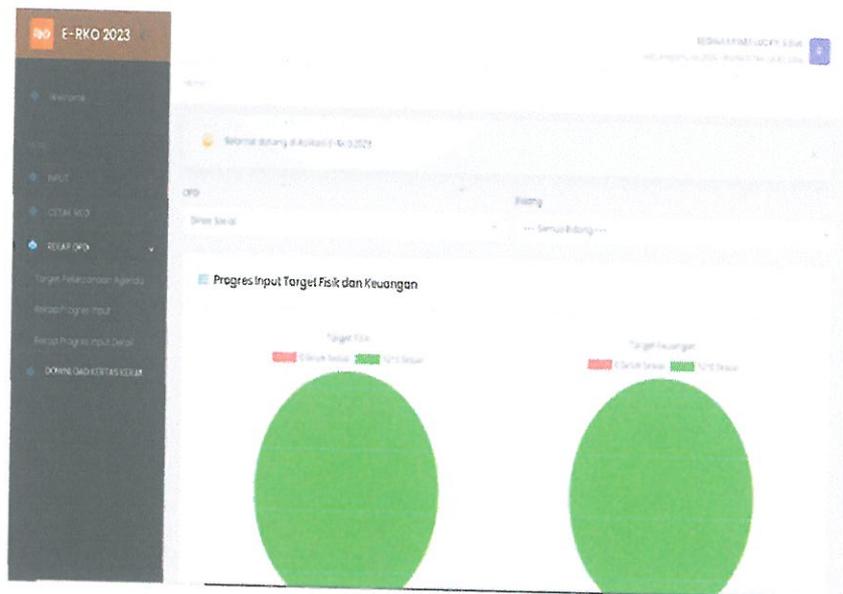
WILAYAH : 106 - PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja					Kinerja Program	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)	Rasio (%)
			Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun					
1	
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS												
11	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	1.500.000.000	100%	74,7%	100%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN KEARIFAN BUDAYA MELAYU												
12	

© 2023 - Government of Central Java

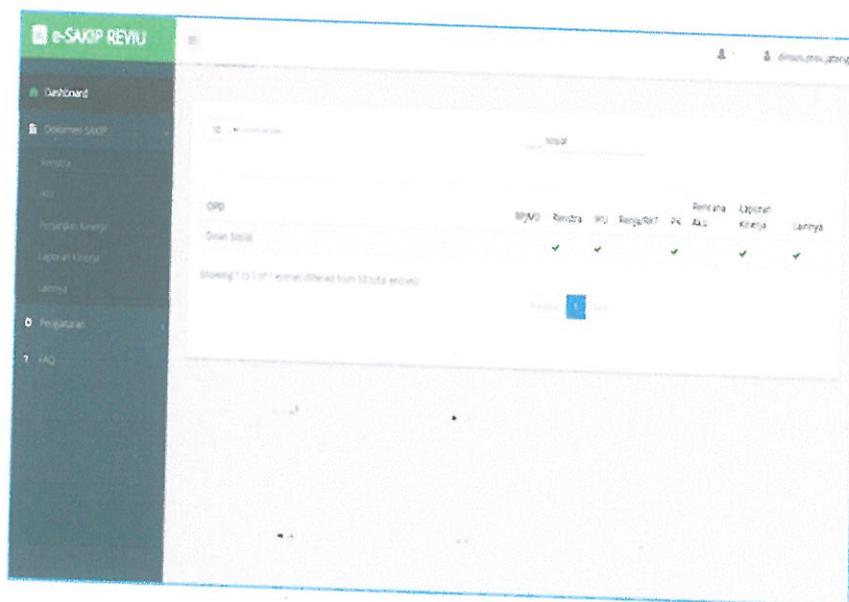
➤ e-RKO

Sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran untuk menetapkan penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



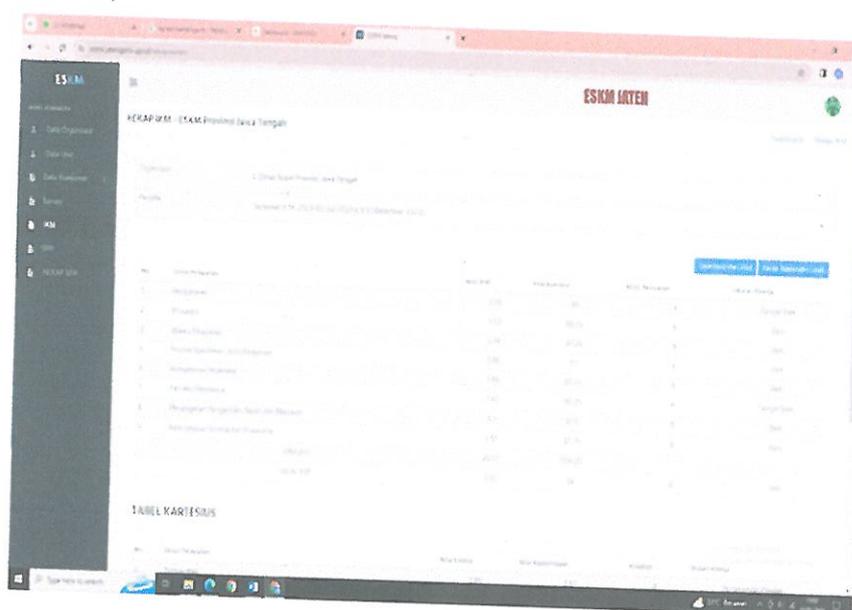
➤ e-SAKIP Reviu

Sistem yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



➤ e-SKM

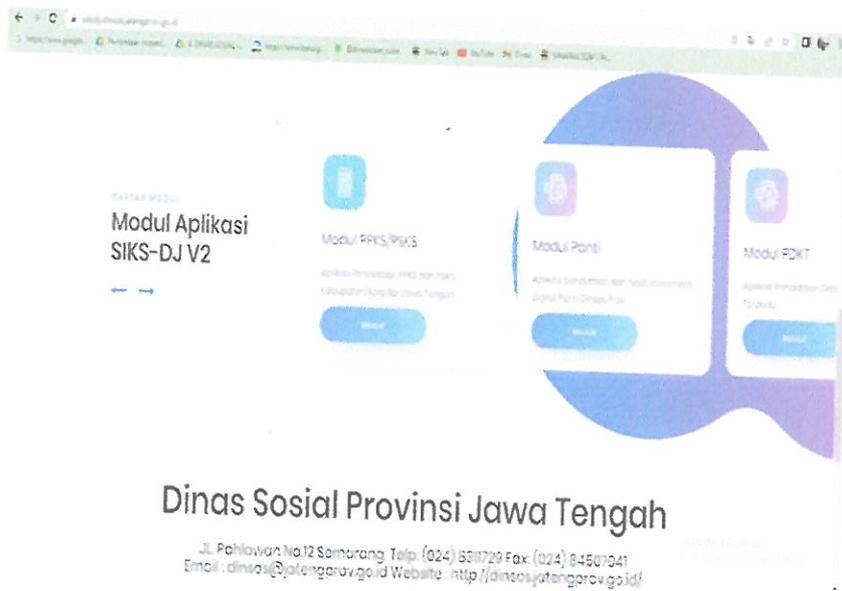
Sistem aplikasi yang berfungsi sebagai elektronik standar pelayanan publik.





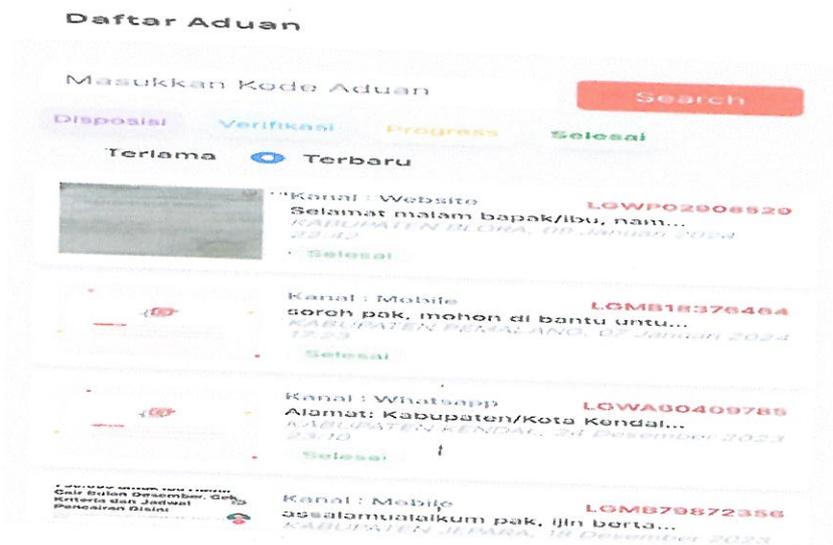
➤ Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Dari Dalam OPD
SIKS – DJ V2

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (SIKS-DJ V2) merupakan aplikasi yang dikembangkan Dinas Sosial yang terintegrasi berbagai layanan penyelenggaraan sosial di Jawa Tengah, di dukung data yang valid (PPKS, PSKS dan Penerima Manfaat di Panti Pemerintah) melalui 1 aplikasi dengan berbagai macam modul.



Lapor Gub

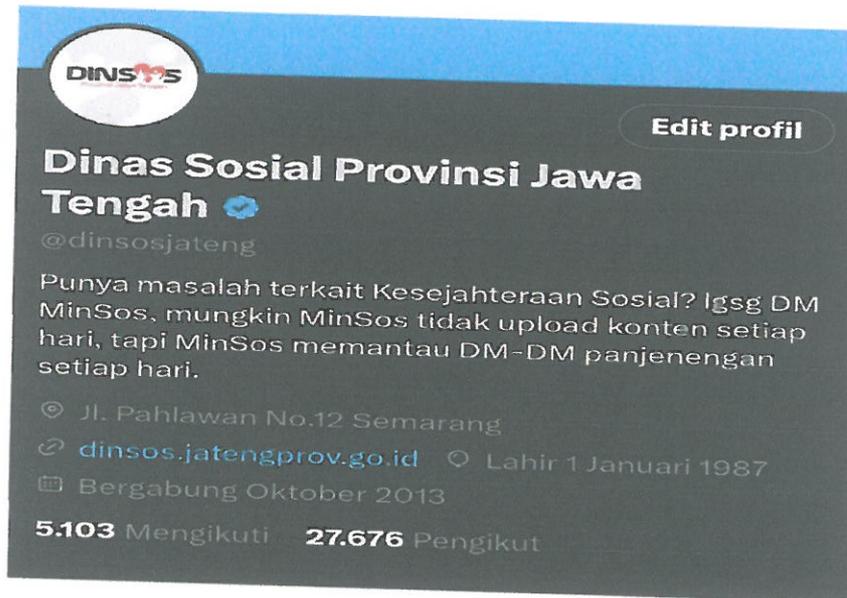
Portal media aduan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan media sosial, website dan call center.





X Sosial Media

Portal media publikasi berbasis text, sasaran pengguna X usia dewasa menengah ke atas. Jenis informasi sekilas berita dan sosialisasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, jangkauan publikasi kurang lebih 27.700 netizen.



Instagram

Portal media publikasi berbasis gambar dan video, sasaran pengguna Instagram usia dewasa menengah kebawah. Jenis informasi dan berita seputar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, jangkauan publikasi kurang lebih 15.300 netizen.



Tik Tok

Portal media publikasi berbasis gambar dan video, sasaran pengguna Tik Tok usia dewasa menengah kebawah. Jenis informasi dan berita seputar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, jangkauan publikasi kurang lebih 110 netizen.





Youtube

Portal media publikasi berbasis video, sasaran pengguna Youtube keseluruhan usia. Jenis informasi video live kegiatan, podcast, sosialisasi, berita dan statistik, jangkauan publikasi kurang lebih 1.100 netizen.



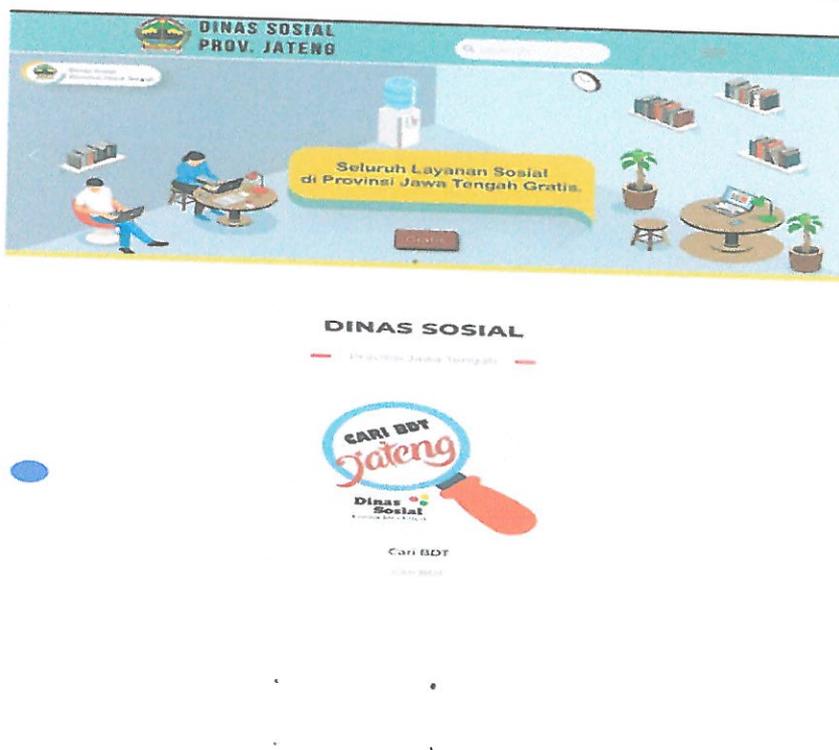
Facebook

Portal media publikasi berbasis gambar dan video sasaran pengguna facebook usia dewasa menengah ke atas. Jenis informasi sosialisasi dan berita program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, jangkauan publikasi kurang lebih 4.500 netizen.



Web Utama

Portal informasi utama Dinas yang menyajikan seluruh informasi berdasarkan Daftar Informasi Publik PPID Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Jenis informasi dokumen, informasi publik dan berita program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) merupakan tuntutan publik atas kinerja dari pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai tindak lanjutnya adalah setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja serta melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya dengan sebaik-baiknya.

Kerangka pengukuran kinerja instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu ketentuan dalam Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi, adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$



2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja LKJIP

NO	KATAGORI	SKALA CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1	Sangat Baik	> 100 %
2	Baik	85 – 100 %
3	Cukup	65 – 84,99 %
4	Kurang	50 – 64,99 %
5	Sangat Kurang	< 50 %

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan tahun 2023 yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, meliputi: Tujuan 1. Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan sasaran strategis meningkatnya Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani, dengan pencapaian kinerja sebesar 100 % kategori "**Baik**"

2. Meningkatkan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial



(PSKS) dengan sasaran strategis Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pencapaian kinerja sebesar 106,43 % katagori "**Sangat Baik**", dan tujuan 3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan sasaran strategis 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan pencapaian nilai kinerja OPD SAKIP sebesar 85,50 atau 106,88 % katagori "**Sangat Baik**", dan 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan pencapaian nilai kinerja sebesar 88 atau 100 % katagori "**Baik**", dari ketiga tujuan diatas rata-rata jumlah persentasenya **103,29 %** atau dikategorikan "**Sangat Baik**" dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL 3.1.2
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	%	
1.	Menurunkan Populasi Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	2,37	2,37	100	2,37
		Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	%	100	100	100	2,37
2.	Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase peningkatan kapasitas bagi PSKS	%	34,38	36,59	106,43	34,38



	Meningkatnya kemampuan PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya setelah mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	106,43	106,43	34,38
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	N	88	88	100	88
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N	80	85,50	106,88	80
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	N	88	88	100	88

Pada sub bab ini menyajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dapat dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pencapaian target dan realisasi kinerja indikator sasaran tahun 2023 yaitu menurunkan populasi PPKS, meningkatkan peran PSKS dan meningkatkan Tata Kelola OPD yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.1.3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %	Katagori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menurunkan Populasi Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	2,37	2,37	100	Baik	e-Controlling
	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS ditangani yang meningkat kesejahteraan sosialnya					
2	Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase peningkatan kapasitas bagi PSKS	34,38	36,59	106,43	Sangat Baik	e-Controlling
	Meningkatnya kemampuan PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya setelah mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial					
3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	88	88	100	Baik	ESKM Jateng
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	85,50	106,88	Sangat Baik	e-SAKIP Reviu
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88	100	Baik	ESKM Jateng



Pada tujuan 1 **Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan sasaran strategisnya meningkatkan kesejahteraan sosial PPKS yang ditangani dan indikator kinerja persentase penanganan PPKS target yang ditangani sebanyak 2,37 % dan realisasinya 2,37 % tercapai 100 %. Program kegiatan yang mendukung penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial antara lain:

a. Program Rehabilitasi Sosial

1) Bantuan SOSH Permakanan di Panti Swasta (LKS/LKSA)

Melalui kegiatan pemberian bantuan permakanan SOSH di Panti Swasta atau LKS / LKSA sebanyak 4.450 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. LKS Penyandang Disabilitas sebanyak 2.100 orang, Foto dokumentasi dibawah ini pada saat droping pemberian bantuan permakanan SOSH untuk 45 penerima manfaat disabilitas di LKS Penyandang Disabilitas Yayasan Rumah Cinta di Kabupaten Karanganyar, sumber data dan dokumentasi Sie Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Bidang Rehabilitasi Sosial.





b. LKSA (anak) sebanyak 1.700 anak

LKSA Panti Asuhan Sinar Kasih Bumiayu Kabupaten Brebes mendapatkan bantuan permakanan SOSH untuk 10 anak dan LKSA Panti Asuhan Muhamadiyah Cabang Kedungwuni Kabupaten Pekalongan menerima bantuan permakanan SOSH untuk 10 orang, bantuan SOSH diterima langsung oleh pengurus panti asuhan. Sumber data Sie Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Bidang Rehabilitasi Sosial.



c. LKS Lanjut Usia sebanyak 400 Orang

Pemberian permakanan SOSH untuk LKS yang menangani lanjut usia terlantar di Yayasan Bethani Bala Keselamatan Kota Semarang mendapat bantuan permakanan SOSH untuk 15 penerima



manfaat dan Panti Werdha Salib Putih Kota Salatiga mendapat bantuan permakanan SOSH untuk 20 penerima manfaat di LKS tersebut, sumber data dan dokumentasi dari Sie Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Bidang Rehabilitasi Sosial.



d. LKS PGOT sebanyak 250 orang.

Dokumentasi foto kegiatan penyerahan bantuan permakanan SOSH di Yayasan Bina Lestari Mandiri Kabupaten Brebes yang mendapat bantuan SOSH untuk 15 penerima manfaat gelandangan psikotik dan orang terlantar, sumber data dan dokumentasi sie Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Bidang Rehabilitasi Sosial.



2) Rehabilitasi Sosial dalam Panti

Rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang mendapatkan penanganan dan rehabilitasi sosial di 27 Panti Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas daya tampung sebanyak 4.602 penerima manfaat. Salah satu dari 27 Panti Pelayanan Sosial tersebut adalah Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang, lokasi di Jl. Ringin Bhakti Raya Kelurahan Kramas Kecamatan Tembalang Semarang. Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial di bidang rehabilitasi sosial meliputi bimbingan fisik, mental, sosial dan latihan keterampilan bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan di masyarakat. Kapasitas daya tampung di Panti Mardi Utomo



Semarang sebanyak 110 PM, kegiatan keseharian penerima manfaat di PPS PGOT Mardi Utomo Semarang mendapat layanan pemberian makan 3 kali sehari sesuai dengan standar pelayanan minimal, dengan SOSH panti tahun 2023 sebesar Rp. 20.000,- per orang/hari.



Setelah makan pagi penerima manfaat di PPS PGOT Mardi Utomo melaksanakan apel pagi, senam kesegaran jasmani dan pada hari tertentu ada pembinaan disiplin diri dari Babinsa Kelurahan Kramas dan Polsek Kecamatan Tembalang.



Jadwal selanjutnya PM keseharian di dalam panti membersihkan lingkungan dan taman panti (Taman Pelangi) tempat rekreasi taman sebagai wahana bermain, spot foto dan taman hiburan masyarakat sekitar, dan lokasinya menyatu dengan Panti Mardi Utomo Semarang.



Pemberian bimbingan mental spiritual (bimbingan rohani baik yang beragama Islam maupun Kristen) kepada penerima manfaat setiap hari Senin dari pukul 08.30 sampai dengan 11.30 dilanjutkan sholat dhuhur yang dibimbing oleh Kanwil Kementerian Agama (Depag) Kota Semarang, pekerja sosial dan pendamping dari panti, seperti dalam dokumentasi kegiatan dibawah ini.



Setelah melaksanakan sholat dhuhur dan makan siang kemudian pemberian berbagai keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki masing-masing penerima manfaat. Keterampilan yang diberikan dalam PPS PGOT Mardi Utomo Semarang ada pertukangan kayu, perbengkelan las, membatik, menjahit, tata boga, barista, pembuatan telur asin, potong/cukur rambut, pertanian yang memanfaatkan lahan kosong dilingkungan panti mereka diajarkan menanam sayur mayur dan peternakan ikan lele yang nantinya dapat dinikmati penerima manfaat serta pembuatan pupuk kompos, instruktur dari pegawai panti dapat dilihat dalam dokumentasi keterampilan di Panti Mardi Utomo sebagai berikut :



1. Pertukangan Kayu



2. Perbengkelan Las





3. Membatik



4. Menjahit





5. Tata Boga



6. Barista





7. Pembuatan Telur Asin



8. Potong/Cukur Rambut





9. Pertanian dan Pembuatan Pupuk Kompos



10. Ternak Lele





Pelayanan kesehatan penerima manfaat (PM) Panti Mardi Utomo bekerja sama dengan Puskesmas Rowosari Semarang dan Poliklinik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, tim medis dari Puskesmas dan Poliklinik Dinas Sosial bergantian datang ke Panti untuk memeriksa kesehatan PM sebulan 2 kali. Bila ada salah satu penerima manfaat mempunyai penyakit yang serius dirujuk ke RSUD Wongsonegoro Kota Semarang dengan menggunakan fasilitas BPJS.



Dibawah ini dokumentasi hasil karya penerima manfaat selama dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial di Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang, yang nantinya dapat bermanfaat ilmu dan karya mereka dalam kehidupan dilingkungan masyarakat tempat tinggalnya.





b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1) Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal

Ada 2 kegiatan dalam sub kegiatan pengangkatan anak yaitu Sosialisasi dan Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal, dengan penjelasannya sebagai berikut :

a). Sosialisasi

Sosialisasi pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal pelaksanaan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan peserta sosialisasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Diharapkan petugas yang membidangi pengangkatan anak dapat mewujudkan kualitas penyelenggaraan pengangkatan anak berdasar standar pelayanan pemenuhan kebutuhan dan menjamin perlindungan terbaik bagi anak. Sumber data dan dokumentasi Sie Anak dan Lanjut Usia di Bidang Rehabilitasi Sosial.





b). Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal pada tahun 2023 dengan target 100 % yang memproses pengajuan pengangkatan anak dan realisasi 100 % terfasilitasi melalui pengangkatan anak di 35 Kabupaten/Kota. Berkas pengajuan usulan pengangkatan anak dari 35 Kabupaten/Kota diajukan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya di proses melalui sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA), beranggotakan dari berbagai unsur terkait terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Apabila berkas telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak, maka tim PIPA merekomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan SK. Kemudian berkas dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk segera diajukan dan diproses di Pengadilan Tinggi dimana anak tersebut tinggal. Sumber data dan dokumentasi Sie Anak dan Lanjut Usia di Bidang Rehabilitasi Sosial.



Setelah putusan pengangkatan anak di Pengadilan Tinggi Kabupaten/Kota selesai, dan anak diasuh orang tua angkat beberapa bulan kemudian dilakukan monev cota untuk memastikan bahwa anak diasuh dengan baik dan melihat tumbuh kembang anak dalam pengasuhan keluarga angkatnya..





2) Pengolahan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berupaya menjembatani kebutuhan daerah dalam penyediaan data kemiskinan yang ter update dan akuntabel dengan mengembangkan Data Terpadu Jawa Tengah melalui aplikasi SIKS-DJ V.2 Modul Data Terpadu Jawa Tengah (DT Jateng) yang sumber datanya adalah DTKS Kementerian Sosial. Aplikasi yang digunakan untuk proses verval data dalam rangka melengkapi variabel data yang hilang, sehingga dapat mendukung perumusan program penanggulangan kemiskinan, intervensi kesejahteraan sosial serta kebutuhan penanganan penduduk miskin lainnya. Verval dilaksanakan dari tingkat Desa/Kelurahan yang dikoordinir Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Hasil olah data diarahkan pada pemenuhan kebutuhan perangkat daerah terkait maupun pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Disamping pengolahan DTKS, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah juga berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri ketika hampir seluruh energi dicurahkan untuk perbaikan DTKS dan turunannya, pemutakhiran data PPKS kurang mendapat tempat, namun pelaksanaan pemutakhiran data dapat terlaksana dengan baik, sumber data dan dokumentasi dari Sie Pengolahan Data di Bidang Penanganan Fakir Miskin.



a). Bantuan KUBE Fakir Miskin Pedesaan

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Wilayah II (Fakir Miskin Pedesaan), melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat miskin pedesaan. Kegiatannya pembentukan dan pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan masyarakat di daerah setempat, agar tumbuh jiwa entrepreneurship, menambah kemampuan dan keterampilan serta bantuan permodalan.

Tahun 2023 jumlah KUBE yang mendapatkan penguatan kapasitas sebanyak 100 KUBE atau 1.000 orang (1 kelompok KUBE beranggotakan 10 orang), dan yang mendapatkan bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 50 KUBE, masing-masing KUBE nilai bantuannya Rp. 20.000.000,- sumber data dan



Rp. 20.000.000,- sumber data dan dokumentasi dari Sie Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan di Bidang Penanganan Fakir Miskin.



3) PPKS Non Produktif Yang Mendapatkan Jaminan Sosial

a). Kartu Jateng Sejahtera / KJS

Bantuan sosial terhadap PPKS Non Produktif yang mendapatkan jaminan sosial melalui kartu Jateng Sejahtera (KJS) sebanyak 12.764 orang, menerima bantuan sebesar Rp. 370.000,- selama 12 bulan pencairan bantuannya per tri wulan / 4 tahap. Sumber data dan dokumentasi dari Sie Jaminan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.



b). Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Penanganan dampak sosial kemasyarakatan berupa bantuan langsung tunai / BLT, penyaluran BLT dimaksudkan untuk menurunkan tingkat inflasi dan pemulihan ekonomi di Jawa Tengah. Bantuan langsung tunai diberikan kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan masyarakat miskin hasil pemetaan Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebanyak 78.000 orang selama 4 bulan (Maret s/d Juni 2023) yang dicairkan pada tahap I dan II (April dan Juni) Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- pada perubahan anggaran mendapatkan tambahan sebulan (Tahap III) yang diserahkan



pada bulan Desember 2023 untuk 78.000 orang dan 3.185 orang dari anggaran return tahap I dan II, sehingga tahap III berjumlah 81.185 orang penerima bantuan DBHCHT. Sumber data dan dokumentasi dari Sie Jaminan Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

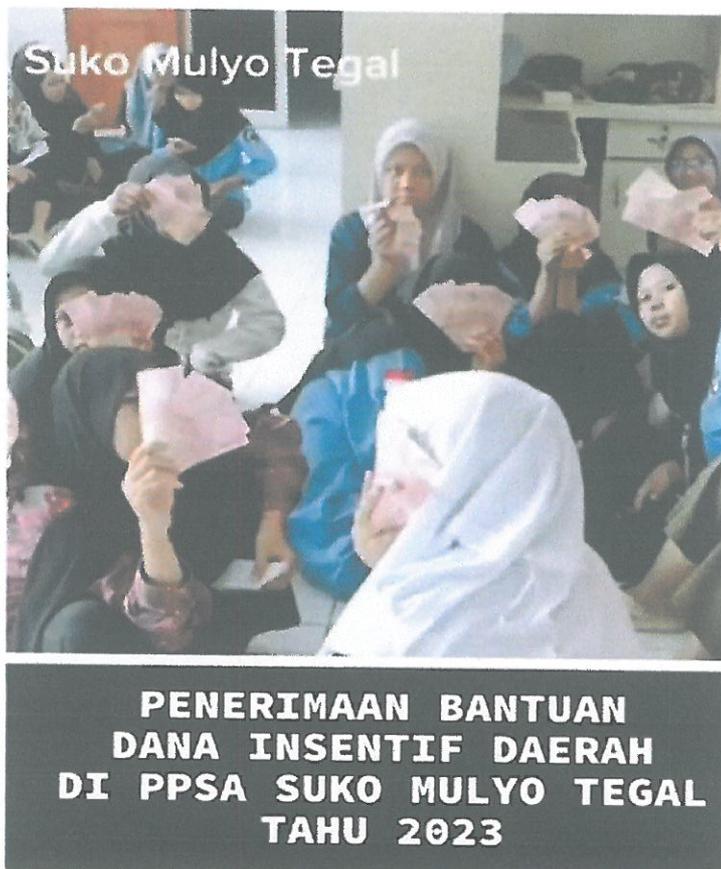


c). Dana Insentif Daerah (DID)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 semester 2 (dua) mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.441.000.000,- sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah / Provinsi yang berkinerja baik. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan DID di peruntukkan Rehabilitasi



Sosial, dana tersebut dialokasikan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk tambahan suplemen atau nutrisi pada 2.100 penerima manfaat penyandang disabilitas, 400 penerima manfaat lanjut usia, 1.700 penerima manfaat anak asuhan dan 250 penerima manfaat tuna sosial di Panti/LKS Swasta. Disamping itu bantuan untuk permodalan purna bina penerima manfaat di panti pemerintah penyandang disabilitas sebanyak 122 orang dan anak putus sekolah 94 orang, serta diperuntukkan bantuan pendidikan 900 penerima manfaat di panti pemerintah, bantuan berupa penyediaan peralatan pendidikan dan transport. Sumber data dan dokumentasi dari Bidang Rehabilitasi Sosial.





c. Program Penanganan Bencana

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dalam penanganan bencana alam dan bencana sosial di Jawa Tengah tercapai target 100 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

1). Penanganan Bencana Alam

Penanganan korban bencana alam tercapai target 100 % yaitu sebanyak 60.340 jiwa yang terdampak bencana alam di Jawa Tengah. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana baik dalam pemberian permakanaan, sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi dan penanganan khusus bagi kelompok rentan, Sumber data dan dokumentasi dari Sie Bencana Alam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.





Korban bencana alam juga mendapatkan layanan dukungan psikososial dari Tim Relawan dan petugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial) diharapkan korban bencana alam dan yang terdampak bencana merasa nyaman dan tidak merasakan trauma, terutama trauma bagi anak-anak yang mengalami bencana alam. Sumber data dan dokumentasi dari Sie Bencana Alam Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial.



2). Penanganan Bencana Sosial

Bencana sosial capaian kinerjanya tercapai 100 % sesuai dengan target sebanyak 1.305 orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal, keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi pemulangan orang terlantar tidak tercukupi sedangkan



hampir setiap hari orang terlantar datang membutuhkan pelayanan. Upaya untuk mengatasinya dengan kerjasama lintas sektor dan biaya fasilitasi pemulangan orang terlantar dibiayai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sumber data dan dokumentasi dari Sie Bencana Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.



d. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Pada program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan tercapai target 100 % dengan kegiatannya yaitu pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik keberkasi daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal sebanyak 100 orang. Gambar dibawah ini adalah



penjemputan TKI bermasalah dari RPTC Tanjungpinang Kepulauan Riau ke daerah asal Kabupaten Purworejo dan Kendal Provinsi Jawa Tengah, dan pemulangan pekerja migran kiriman dari RPTC Kementerian Sosial yang akan dikembalikan ke daerah asal. Sumber data dan dokumentasi dari Sie Bencana Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

1). Penjemputan TKI di Tanjungpinang





2). Pemulangan Pekerja Migran ke Daerah Asal



Tujuan 2 **Meningkatkan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** dengan sasaran strategisnya meningkatnya kemampuan PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan indikator kinerja persentase peningkatan kapasitas bagi PSKS dengan target sebesar 34,38 % dan terealisasi 36,59 % tercapai 106.43 %. Program kegiatan yang mendukung meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial di dukung oleh 2 kegiatan yakni Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial pada tahun 2023 target 34,38 % tercapai 36,59 % (106,43 %), dengan memberikan penguatan kapasitas PSKS sebanyak 11.029 orang dari

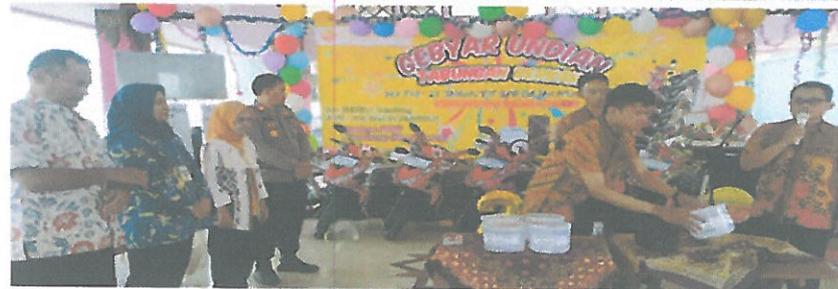


target 10.365 orang yang melaksanakan UKS. Peningkatan kemampuan PSKS bagi pekerja sosial masyarakat (PSM), Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), peningkatan peran tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP), pembentukan Puskesmas dan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) yang dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan di dukung adanya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan Kapasitas PSKS yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan organisasi sosial secara luring maupun daring sehingga menjangkau jumlah peserta lebih banyak. Sumber data dan dokumentasi dari Sie Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial.





Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi dengan jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui undian berhadiah sebanyak 200 orang, sumber data dan dokumentasi dari Sie Undian dan Penyuluhan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial.



b. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan target tercapai 100 %, tidak ada permasalahan yang signifikan terkait pelaksanaan rehabilitasi taman makam pahlawan nasional (TMPN) yang berjumlah 1 dan kegiatan penanaman nilai-nilai kepahlawanan. Manfaat dari program ini, perintis kemerdekaan tertangani dan masyarakat mendapatkan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Sumber data



dan dokumentasi dari Sie Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial.

1). Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional



2). Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan





Tujuan 3 **Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah** dengan sasaran strategis 1) meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah dan indikator kinerja nilai kepuasan masyarakat dengan target 88 dan tercapai nilai 88 atau 100 % dengan katagori nilai **"Baik"**. Kegiatan yang mendukung program penunjang pelayanan perangkat daerah (PD) yaitu kegiatan administrasi umum dan administrasi keuangan guna untuk meningkatkan indek kepuasan masyarakat (IKM). IKM Dinas Sosial baik dari penilaian hasil survey via email penerima manfaat di Panti, stakeholder terkait dan di dukung dengan media sosial yang menampilkan informasi kegiatan, penanganan serta pelayanan Dinas Sosial kepada masyarakat, seperti Laporan Gubernur, Twitter, Instagram, Website dan Web PPID. Dokumentasi dan sumber data dari PPID dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

a). Penilaian Survey IKM

Unit	Nilai IKM	Nilai Target	Nilai Perolehan	Uraian Kinerja
	80	88	88	Baik
	85	87,5	88	Baik
Unit 1	80	88,5	88	Baik
Unit 2	85	88,5	88	Baik
Unit 3	80	88,5	88	Baik
Unit 4	85	88,5	88	Baik
Unit 5	80	88,5	88	Baik
Unit 6	85	88,5	88	Baik
Unit 7	80	88,5	88	Baik
Unit 8	85	88,5	88	Baik
Jumlah	700	88,5	88	Baik
Nilai Rata-rata	88	88,5	88	Baik



b). Laporan Gub

DI

Hi, dinassosial

Berikut aduan sampai hari ini

0	Disposisi	→
4114	Verifikasi	→
32	Progress	→
1433	Selesai	→

Daftar Aduan

Search

Disposisi
Verifikasi
Progress
Selesai

Terlama
 Terbaru

	<p style="font-size: 10px; margin: 0;">Kanal : Website LGWP02908529</p> <p style="font-size: 10px; margin: 0;">Selamat malam bapak/ibu, nam...</p> <p style="font-size: 10px; margin: 0;">KABUPATEN BLORA, 09 Januari 2024 22:42</p> <p style="text-align: right; font-size: 10px; color: #28a745; font-weight: bold;">Selesai</p>
	<p style="font-size: 10px; margin: 0;">Kanal : Mobile LGMB18376464</p> <p style="font-size: 10px; margin: 0;">soreh pak, mohon di bantu untu...</p> <p style="font-size: 10px; margin: 0;">KABUPATEN PEMALANG, 07 Januari 2024 17:23</p> <p style="text-align: right; font-size: 10px; color: #28a745; font-weight: bold;">Selesai</p>
	<p style="font-size: 10px; margin: 0;">Kanal : Whatsapp LGWA60409785</p> <p style="font-size: 10px; margin: 0;">Alamat: Kabupaten/Kota Kendal...</p> <p style="font-size: 10px; margin: 0;">KABUPATEN KENDAL, 24 Desember 2023 23:10</p> <p style="text-align: right; font-size: 10px; color: #28a745; font-weight: bold;">Selesai</p>
	<p style="font-size: 10px; margin: 0;">Kanal : Mobile LGMB79872356</p> <p style="font-size: 10px; margin: 0;">assalamualaikum pak, ijin berta...</p> <p style="font-size: 10px; margin: 0;">KABUPATEN JEPARA, 18 Desember 2023</p>



c). X



d). Instagram

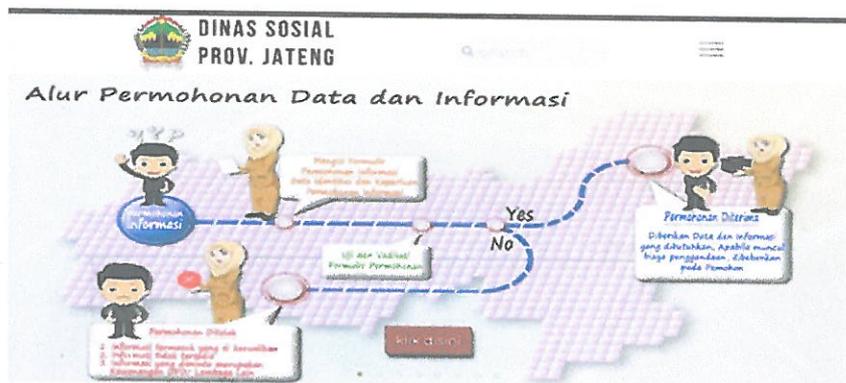




e) Website Utama



f) Web PPID



CARA MENDAPATKAN INFORMASI

1. Permohonan informasi datang ke Meja Layanan Informasi Publik (MIP) Pembantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan membawa fotokopi KTP atau AKIA Penderita/Surat Keterangan Dominis Lembaga Dinas.
2. Meja Layanan Informasi Publik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No.12 Semarang, Telp: (024)8397224, Fax: (024)527904, Email: dmsos@jatengprov.go.id. Petugas akan menghubungi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki layanan dokumen informasi dan permintaan informasi badan publik sesuai dengan struktur dan mekanisme PPID.



g) Facebook



h) Tik Tok





i) Youtube



Sasaran strategis 2) meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah (PD) dengan indikator kerjanya nilai SAKIP perangkat daerah dan indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah target 80 dan tercapai nilainya 85,50 dengan katagori nilai "A" atau "**Sangat Baik**". Kegiatan pendukung penilaian SAKIP OPD yaitu kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah melalui GRMS Jawa Tengah Tahun 2023 antara lain e-Plainning, e-Budgeting, e-Controlling, e-RKO, e-SAKIP dan evaluasi sampai dengan pelaporan dinilai dan dievaluasi oleh Tim SAKIP Provinsi Jawa Tengah. Sumber data dan dokumentasi Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.



a). e-Planning

Dashboard Pagu & RAB Belanja

REGINA FATMA LUCY, S.Sos
OPD Program EPI - 10210027000022004

Dashboard Pagu & RAB Belanja

OPD: Dinas Sosial, Bidang: -- Semua Bidang --, Tahap: Total Lini Pembelian, Tahap 04

Kode	Organisasi	Pagu APBD (Rp)	Total RAB (Rp)	Pagu Verifikasi (Rp)	Status
1001	Dinas Sosial	10.870.000.000	10.870.000.000	10.870.000.000	Selesai
1001.0001	Biaya Penyelenggaraan Sewa	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Selesai
1001.0002	Biaya Rehabilitasi Sewa	9.870.000.000	9.870.000.000	9.870.000.000	Selesai

b). E-Budgeting

RAB Belanja

REGINA FATMA LUCY, S.Sos
OPD Program EPI - 10210027000022004

Dinas: Dinas Sosial, Bidang: Dinas Sosial, Program: PROGRAM PENJAJARAN, JALAN, PEMERINTAH DAERAH

Kategori: Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah

Kode	Uraian Sub Kegiatan	Pagu APBD	Total RAB	Pagu Verifikasi	Status	Status Verifikasi	Aksi
1001.0110.01	Penyediaan Jasa dan Transportasi ASN	81.000.000.000	81.000.000.000	81.000.000.000	Selesai	Selesai	01 / 01
1001.0110.02	Penyediaan Aktivitas Pekerjaan Tugasi ASN	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Selesai	Selesai	01 / 01
1001.0110.03	Penyediaan Penyelenggaraan Pengukuran Verifikasi Keuangan SAKD	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Selesai	Selesai	01 / 01



c). e-Controlling
 ➤ e-Controlling APBD

The screenshot displays the 'Rekap Progres Dinas' interface. It includes a sidebar with navigation options like 'Welcome', 'Home', 'E-Controlling APBD', 'E-Controlling Kinerja', and 'E-Controlling Renc. Binas'. The main content area shows filters for 'Dinas Sosial', 'Rencana Kerja', and 'Desain'. Below the filters is a table titled 'Laporan - Rekap Progres Dinas' with columns for various financial and performance metrics.

No	Kode UPT/Unit	Kategori	TAMBAH					DIBAYAR					DIBAYAR % (Rata-rata)
			Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir % (Rata-rata)	Saldo Akhir % (Rata-rata)	Saldo Akhir % (Rata-rata)	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir % (Rata-rata)	Saldo Akhir % (Rata-rata)	Saldo Akhir % (Rata-rata)	
1	004	Dinas Sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	004.001	Sub Dinas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	004.001.001	Unit Kerja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

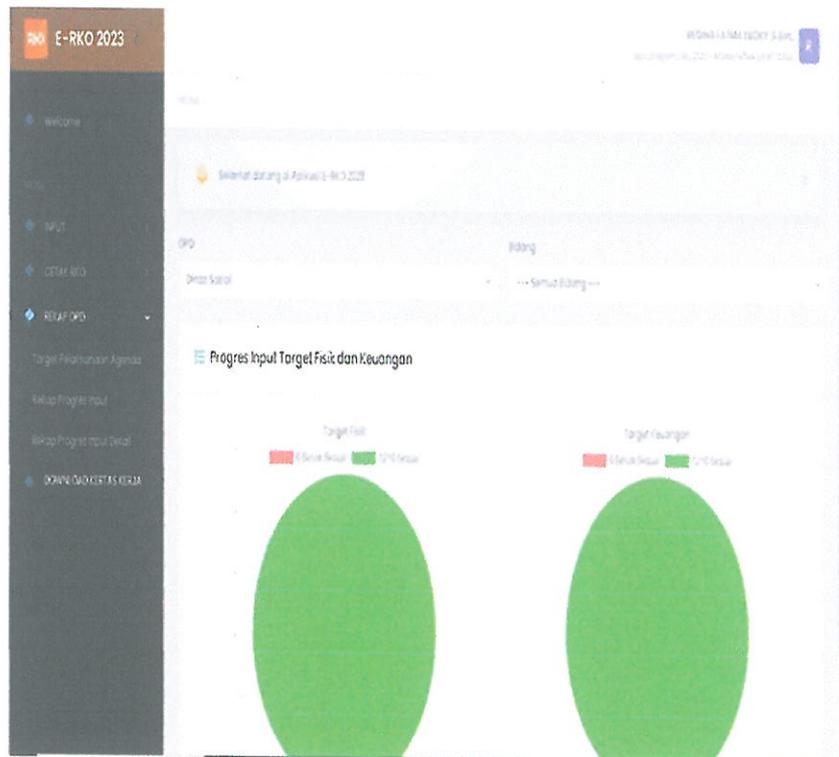
➤ e-Controlling Kinerja

The screenshot displays the 'Cetak L-1 Tahun' interface, titled 'REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023'. It shows a table with columns for 'Indikator Kinerja', 'Profilus Revisi', 'Status', 'Target Kinerja', 'Kinerja Program', 'Tingkat Capaian Kinerja (%)', 'Anggaran (Rp)', 'Rinc. Esensial (Rp)', and 'Rencana 2024'. The table lists various performance indicators and their corresponding values.

No	Indikator Kinerja	Profilus Revisi	Status	Target Kinerja				Kinerja Program		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Rinc. Esensial (Rp)		Rencana 2024
				KPI-1	KPI-2	KPI-3	KPI-4	Realisasi	Target			Esensial (Rp)	Esensial (Rp)	
1	001	001	001	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	001.001	001.001	001.001	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



d). e-RKO



e). e-SAKIP

The screenshot shows the 'e-SAKIP REVUI' dashboard. The left sidebar contains navigation options: 'Dashboard', 'Dokumen SAKIP', 'Revisi', 'RU', 'Rencana RT', 'Perencanaan Kinerja', 'Rencana Aksi', 'Laporan Kinerja', 'DPA', 'Penerapan & Evaluasi', 'TUGAS AKSI Internal', 'Laporan Kinerja Internal', and 'Lainnya'. The main content area displays a table of documents with the following columns: No, Username, Unit Kerja, Tgl Upload, Dokumen, Keterangan, Aksi, and Tanggapan.

No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
1	dinas.prov.jateng	Dinas Sosial	23 Mar 2023 14:08	UJMT	UJIP Dinas Provinsi Jateng 2023	WAPUS	B
2	dinas.prov.jateng	Dinas Sosial	25 Feb 2023 14:15	UJMT	UJIP Dinas 2023	WAPUS	R
3	dinas.prov.jateng	Dinas Sosial	10 Mar 2023 10:05	UJMT	PERENCANAAN UJIP	WAPUS	R
4	dinas.prov.jateng	Dinas Sosial	10 Mar 2023 10:04	UJMT	UJIP PENYUSUN	WAPUS	R
5	dinas.prov.jateng	Dinas Sosial	10 Mar 2023 10:04	UJMT	UJIP MONITORING DAN KINERJA	WAPUS	R
6	dinas.prov.jateng	Dinas Sosial	10 Mar 2023 10:02	UJMT	UJIP PENYUSUNAN KINERJA	WAPUS	R
7	dinas.prov.jateng	Dinas Sosial	10 Mar 2023 10:01	UJMT	UJIP PENDAHULUAN	WAPUS	R
8	dinas.prov.jateng	Dinas Sosial	10 Mar 2023 10:01	UJMT	COARF	WAPUS	R
9	dinas.prov.jateng	Dinas Sosial	24 Jan 2023 15:52	UJMT	UJIP 2019	WAPUS	R



f). Desk Penyusunan dan Evaluasi Tim SAKIP

➤ Desk Penyusunan



➤ Evaluasi SAKIP





2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 - 2023

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikutini:

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2019 - 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target %	Realisasi %	Capaian %	target %	Realisasi %	Capaian %	target %	realisasi %	Capaian %	target %	Realisasi %	Capaian %	target %	realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS ditangani yang meningkat kesejahteraan sosialnya	0,47	0,47	100	0,95	0,95	100	1,42	1,42	100	1,90	5,55	292,10	2,37	2,37	100
2.	Meningkatnya kemampuan PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya setelah mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	6,88	6,88	100	13,75	11,99	87,14	15,84	15,84	100	25,74	25,74	100	34,38	36,59	106,43
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	81,75	116,78	70	79,24	113,2	77	79,81	03,65	79	79,63	100,80	80	85,50	106,88
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	77	85	110,39	77	86,75	112,66	78	87,25	11,86	87	87,75	100,86	88	88	100

Tabel indikator persentase PPKS yang ditangani meningkat kesejahteraan sosialnya merupakan target penurunan PPKS pada awal tahun renstra 2019 menargetkan 0,47 % dan tercapai 0,47 % (100 %), tahun ke dua 2020 menargetkan 0,95 % tercapai target



100 %, tahun 2021 atau tahun ke 3 Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang menargetkan sebesar 1,42 % tercapai 100 %. Demikian juga tahun ke 4 target di tahun 2022 sebesar 1,90 % tercapai 5,55 % melebihi target kinerja sebesar 292,10 % dan tahun ke 5 pada tahun 2023 targetnya sebesar 2,37 % tercapai 2.37 % (100 %) sesuai dengan target RPJMD.

Pada indikator PSKS yang meningkat kemampuan setelah mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2019 menargetkan 6,88 % tercapai 6,88 % (100 %), tahun ke dua renstra tahun 2020 bertepatan dengan wabah pandemi covid 19 target 13,75 % tercapai 11.99 % (87,14 %) dan di tahun 2021 target 15,84 % tercapai 15,84 % (100 %). Pada perhitungan target tahun 2021 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengajukan revisi penyesuaian target dan capaian pada kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) target yang semula 20,63 % menjadi 15,84 %. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 dan pembatasan kegiatan PSKS di Kabupaten/Kota. Guna mengejar ketertinggalan capaian kinerja tahun 2021, maka Dinas Sosial tahun 2022 melaksanakan strategi dan kerja yang dinamis untuk pencapaian target 25,74 % dan tercapai 100 %, diakhir target Renstra tahun 2023 menargetkan sebesar 34,38 % tercapai 36,59 % (106,43%) melebihi target RPJMD.

Indikator persentase nilai kepuasan masyarakat tingkat capaian sangat tinggi diatas 100 % pada tahun 2019 target nilai 77 tercapai 85 atau 110,39 %, tahun 2020 target nilai 77 tercapai 86 (112,66 %), tahun 2021 diangka 111,86 % dari target nilai 78 terealisasi 87,25, pada tahun 2022 agak menurun meski nilai angkanya naik yaitu target nilai 87 realisasi 87,75 atau 100,86 %, hal in dikarenakan angka targetnya dinaikan sehingga persentasenya turun. Tahun 2023 target nilai 88 tercapai 88 atau



100 %. Ketercapaian nilai kepuasan masyarakat sesuai dengan target dikarenakan Penerima Manfaat (PM), keluarga PM dan instansi terkait yang mengisi kuisioner melalui email masing-masing responden pada 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan hasil yang baik dan sangat puas menerima pelayanan di panti pemerintah.

Indikator persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah tingkat capaian juga sangat tinggi diatas 100 % yakni pada tahun 2019 target nilai 70 tercapai 81,75 (116,78 %), tahun 2020 target nilai 70 tercapai 79,24 atau 113,2, tahun 2021 nilai SAKIP mulai merangkak naik namun persentasenya turun karena target nilai dinaikkan dari 70 menjadi 77 dan terealisasi 79,81 atau 103,65 %, pada tahun 2022 persentase nilainya 100,80 % target nilai dinaikkan menjadi 79 terealisasi 79,63. Tahun 2023 ini target nilai 80 tercapai 85,50 (106,88 %), sehingga tahun 2023 Dinas Sosial mendapat piagam penghargaan sebagai SKPD dengan peningkatan nilai SAKIP terbaik. Tingkat capaian nilai SAKIP Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melampaui target dikarenakan sasaran strategis pada Renstra dapat tercapai lebih dari 100 % meski di tahun kedua dan ketiga agak menurun capaiannya pada salah satu indikator kinerjanya yang disebabkan wabah pandemi covid 19 dan refocusing anggaran sehingga target persentase peningkatan kapasitas bagi PSKS tidak tercapai, pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengajukan revisi penyesuaian target dan capaian, Tahun 2022 target dan capaian tercapai 100 % dan dapat mengejar ketertinggalan capaian diakhir Renstra tahun 2023 yang menargetkan 34,38 % dan tercapai realisasinya 36,59 % atau 106,43 % melebihi target RPJMD.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah (2023)

Capaian kinerja antara target dan realisasi sasaran strategis di bawah merupakan indikator kinerja yang terdapat



dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang dicapai dalam tahun 2023 dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.5
Realisasi Kinerja dan Target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Capaian %	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS ditangani yang meningkat kesejahteraan sosialnya	2,37	2,37	100	Sesuai Target
2.	Meningkatnya kemampuan PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya setelah mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	36,59	34,38	106,43	Over target
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,50	80	106,88	Over target
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Prosentase nilai kepuasan masyarakat	88	88	100	Sesuai Target

Capaian kinerja jangka menengah atau target akhir Renstra 2019 - 2023 yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dicapai pada indikator Persentase PPKS yang ditangani meningkat



kesejahteraan sosialnya 2,37 % atau sejumlah 96.070 PPKS mendapatkan penanganan. Sasaran target kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 5 (lima) tahun diarahkan pada menurunkan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diawal target Renstra 2019 sejumlah 19.214 orang (0,47 %), tahun 2020 sejumlah 38.428 (0,95 %), tahun 2021 sejumlah 57.642 (1,42 %), tahun 2022 target sejumlah 76.856 (1,90 %) realisasinya tercapai melebihi target yaitu sejumlah 193.531 (5,55 %) dan tahun 2023 jumlah 96.070 (2,37 %) tercapai 100 % PPKS yang mendapatkan penanganan, dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Indikator Tujuan Penurunan PPKS



Sasaran target kinerja ke 2 (dua) yaitu meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 2.073 orang atau 6,88 % per tahunnya dari jumlah total PSKS se Jawa Tengah yang berjumlah 30.145 PSKS pada tahun 2018.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan target kinerja tahun 2020 dan 2021, karena adanya wabah pandemi covid 19 kegiatan mengumpulkan masyarakat atau potensi sumber menjadi kendala dengan diberlakukannya pembatasan



kegiatan masyarakat (PPKM), dan adanya refocusing anggaran dialihkan ke bantuan sosial untuk penanganan pandemi.

Berkat optimisme dan semangat juang yang tinggi tahun 2022 target sebesar 25,74 % dapat terealisasi 25,74 % (100 %), sehingga diakhir Renstra dan RPJMD yaitu tahun 2023 target 34,38 % atau sejumlah 10.365 PSKS tercapai melebihi target sebesar 36,59 % (106,43 %) atau 11.029 PSKS yang meningkat kemampuannya setelah mendapatkan penguatan kapasitas, dapat dilihat dalam Grafik berikut ini :

Grafik 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Indikator
Tujuan Peningkatan PSKS



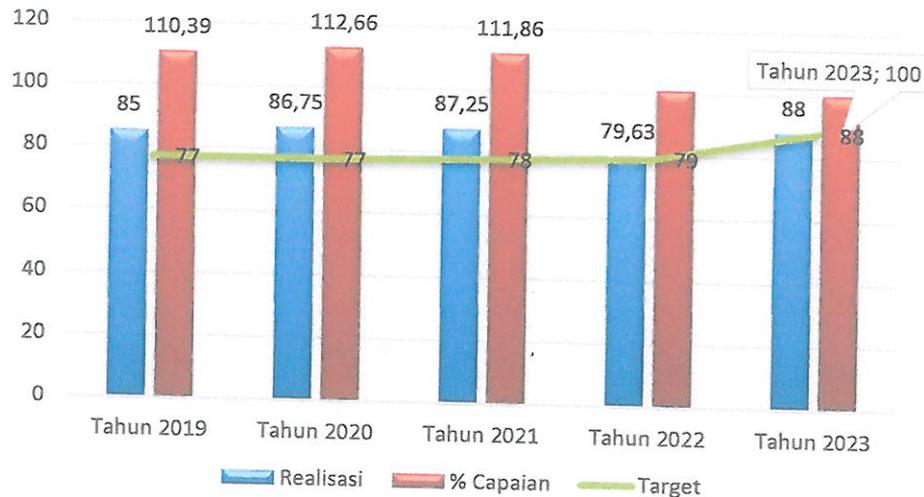
Sasaran target kinerja ke 3 (tiga) yaitu meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja nilai kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun terus meningkat melebihi target yang ditetapkan Dinas Sosial yang semula nilai 77 ditahun 2021 dinaikkan menjadi 78 dengan realisasi nilai 87,25, dan tahun 2022 target nilai dinaikkan kembali menjadi 87 realisasi nilai 87,75 (100,86 %), maka diakhir tahun ke lima Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tercapai target nilai kepuasan masyarakat 88 terealisasi 88 atau 100 %, karena dari tahun ke tahunnya nilai kepuasan yang diberikan masyarakat



kepada Dinas Sosial terus meningkat, dapat dilihat diagram dibawah ini:

Grafik 3.3
Target dan Realisasi Kinerja
Indikator Tujuan Peningkatan Tata Kelola

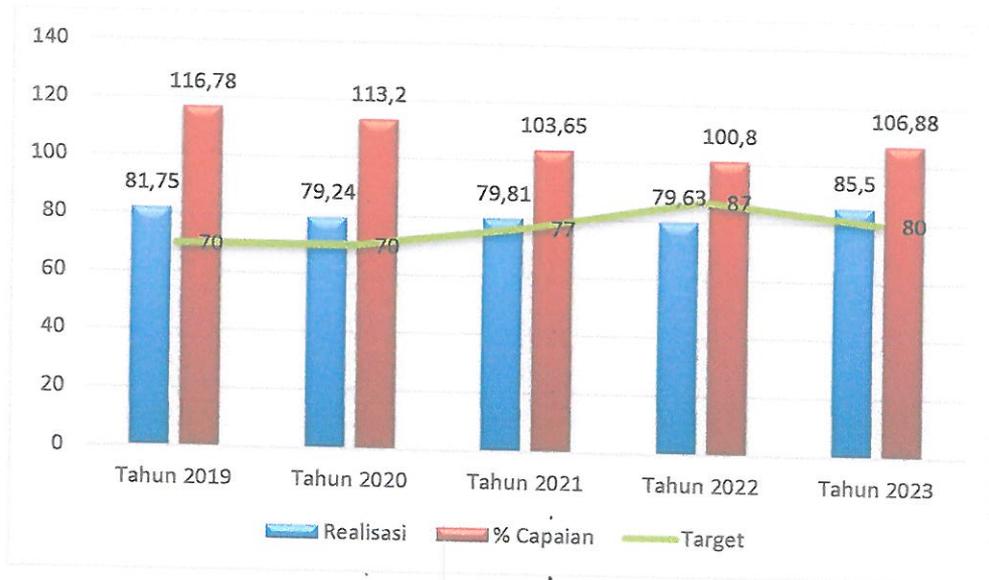
Persentase nilai kepuasan masyarakat



Demikian juga sasaran target kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerjanya nilai SAKIP Perangkat Daerah target kinerja 80 dengan realisasi nilai 85,50 tercapai 106,88 %, pada tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan sebagai SKPD dengan peningkatan nilai SAKIP terbaik, dapat di lihat dalam grafik dibawah ini :



Grafik 3.4
Persentase Nilai SAKIP
Perangkat Daerah



4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada pencapaian target dan realisasi kinerja indikator sasaran tahun 2023 yaitu penurunan populasi PPKS target 2,37 % realisasi sebesar 2,37 %, peningkatan PSKS sebesar 34,38 % realisasi 36,59 % (106,43 %), peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, nilai SAKIP target 80 terealisasi 85,50 (106,88 %) dan nilai IKM target 88 terealisasi 88 (100 %). Capaian target kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentunya ada kendala dan mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.1.6
Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Alternatif Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Persentase PPKS ditangani yang meningkat kesejahteraannya sosialnya	2,37	2,37	100	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalnya pelaksanaan seluruh kegiatan rehabilitasi sosial dasar dalam panti - Adanya migrasi over capaian tahun 2022 dari dana DBHCHT, KJS dan BLT dari dana DID 	
2.	Meningkatnya kemampuan PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya setelah mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	34,38	36,59	106,43	Adanya dukungan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas PSKS yang diselenggarakan Dinas Sosial Kab/Kota dan lembaga sosial secara luring maupun daring	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	85,50	106,88	Adanya dukungan anggaran, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	88	88	100 %	Adanya dukungan partisipasi penerima manfaat, keluarga PM dan stakeholder	



Capaian program kinerja pada sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, untuk lebih jelasnya dapat kita sajikan tingkat keberhasilan, kendala dan upaya yang dilakukan mengatasi permasalahan program dan kegiatan.

Tujuan 1 Menurunkan Populasi PPKS dengan sasaran Meningkatkan kesejahteraan sosial PPKS yang ditangani dan indikator kinerja presentase penanganan PPKS, ada 4 (empat) program pendukung yaitu **Program Rehabilitasi Sosial** memiliki 28 indikator yang seluruh tingkat capaiannya sangat tinggi (100 %) yaitu persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti. Hal ini disebabkan optimalnya pelaksanaan seluruh kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam panti. Jumlah penerima manfaat di dalam panti pemerintah tahun 2023 sebanyak 4.602 orang di 27 panti dan panti swasta/LKS sebanyak 4.450 orang. Capaian kinerja program rehabilitasi sosial pada target RPJMD yaitu pada indikator persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti.

Kendala dalam penyelenggaraan program rehabilitasi sosial yaitu banyaknya jumlah LKS yang mengajukan permohonan bantuan SOSH ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan sasaran bantuan penerima manfaat di dalam panti menggunakan skala prioritas. Manfaat penyelenggaraan program rehabilitasi sosial yaitu meningkatkan keberfungsian sosial dan kesejahteraan sosial PPKS yang ditangani.



Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki 3 indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi (100 %) yaitu persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan, persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, dan persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan. Hal ini disebabkan optimalnya pelaksanaan seluruh kegiatan baik pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi melalui pemberian bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), bantuan KUBE fakir miskin dan pengelolaan data fakir miskin di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Tingkat ketercapaian sangat tinggi dikarenakan migrasi over capaian pada tahun 2023 dengan adanya bantuan sosial KJS dan mendapat tambahan anggaran dari Bantuan Langsung Tunai Dana Insentif Daerah (BLT DID) serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Kendala dalam program perlindungan dan jaminan sosial yaitu pencapaian Bantuan Jaminan Sosial (KJS) tidak terambil. Upaya untuk mengatasi dengan melakukan penggantian penerima manfaat Banjamsos KJS pada saat pencairan di perubahan anggaran. Manfaat penyelenggaraan program perlindungan dan jaminan sosial yaitu tersedianya data fakir miskin yang tervalidasi mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan memiliki 1 indikator yaitu presentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan, hal ini disebabkan optimalnya kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan titik keberkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal, dengan realisasi



100 % sesuai dengan target. Capaian kinerja program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan terhadap target akhir RPJMD tercapai.

Kendala dalam penyelenggaraan program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yaitu kurangnya informasi dan koordinasi instansi terkait dalam pengiriman warga negara migran ke Dinas Sosial Provinsi, sehingga pendataan dan menghambat pemulangan. Upaya yang dilakukan mengatasinya dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Pusat (Kemensos RI) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Sosial/Institusi Sosial) memfasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asal. Manfaat dalam penyelenggaraan program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yaitu dalam fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi ke daerah Kabupaten/Kota asal.

Program Penanganan Bencana memiliki 1 indikator yaitu presentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan dengan tingkat capaian sangat tinggi (100 %). Hal ini disebabkan optimalnya pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan korban bencana alam dan sosial yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana masa tanggap darurat dengan realisasi 100 % sesuai dengan target. Tingkat ketercapaian diakhir RPJMD pada program penanganan bencana sebesar 100 % dengan adanya dukungan kerjasama unsur pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Koramil, Tagana, PMI, Pemadam Kebakaran, relawan dan organisasi kemanusiaan lainnya dalam melakukan upaya penanganan bencana.



Kendala dalam penanganan program bencana yakni ketersediaan sarana dan prasana dalam penanganan bencana belum optimal. Upaya mengatasi permasalahan dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi lintas sektor guna optimalisasi penanganan bencana khususnya pada kelompok rentan. Manfaat dalam penyelenggaraan program penanganan bencana yaitu tertanganinya korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat.

Tujuan 2 Meningkatkan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan sasaran strategis Meningkatnya kemampuan PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator kinerja presentase peningkatan kapasitas bagi PSKS ada 2 (dua) program pendukung yaitu **Program Pemberdayaan Sosial** yang memiliki 1 indikator dengan capaian sangat tinggi (106,43 %) melebihi target RPJMD. Hal ini karena adanya dukungan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas PSKS yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Lembaga/Organisasi Sosial secara *luring* maupun *daring*, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pesertanya.

Kendala dalam penyelenggaraan program pemberdayaan sosial yaitu pelaksanaan penyaluran hibah sering kali tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, karena calon penerima hibah tidak sesuai kriteria dan proses melengkapi persyaratan berkas membutuhkan waktu lama. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan koordinasi dengan mitra pelaksana hibah dan calon penerima hibah menggunakan Buku Saku Hibah Bantuan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman. Manfaat penyelenggaraan program pemberdayaan sosial yaitu meningkatnya PSKS melalui kegiatan penguatan



kapasitas PSKS dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan memiliki 1 indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100 %) sesuai target, yaitu persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan.

Kendala dalam program pengelolaan taman makam pahlawan (TMP) yaitu sarana dan prasarana pemakaman dan pertamanan rusak atau kurang layak. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu perbaikan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas yang ada secara prioritas dan memaksimalkan prasarana yang ada. Manfaat penyelenggaraan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yaitu perintis kemerdekaan mendapatkan perhatian dari pemerintah, terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional secara fisik, kelayakan dan kepatutan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan negara terhadap jasa-jasa para pahlawan dan sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan, serta sebagai obyek *study* dan ziarah dalam upaya meningkatkan penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan.

Tujuan 3 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan sasaran strategis 1). meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja nilai kepuasan masyarakat, kegiatan pendukungnya yaitu Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100 %) target nilai RPJMD sebesar 88 dan realisasi tercapai 88 dan 2) meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah, kegiatan pendukungnya yaitu perencanaan dan evaluasi



kinerja Perangkat Daerah yang memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (106,88 %) melebihi target nilai RPJMD sebesar 80 dan realisasi nilainya 85,50, sehingga di tahun 2023 ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan sebagai SKPD dengan peningkatan nilai SAKIP terbaik.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dicapai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target %	Realisasi %	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	2,37	2,37	100	232.133.449.000	225.122.745.521	95,05	4,95
2	Meningkatnya kemampuan PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	34,38	36,59	106,43	7.961.040.000	7.911.847.500	99,67	0,33
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80	85,50	106,88	938.500.000	928.782.424	98,96	1,04



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	88	88	100	125.451.994.000	120.403.054.829	98,49	1,51
--	----	----	-----	-----------------	-----------------	-------	------

Dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah melalui 7 program, yaitu :

Tujuan pertama menurunkan Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan sasaran strategis Meningkatkan Kesejahteraan Sosial PPKS yang ditangani, ada 4 program yang mendukung yaitu **Program Rehabilitasi Sosial** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.968.104.000 ,- realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.335.264.091,- atau 98,81 % terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.632.839.909,- (1,19 %), **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.176.974.857.000,- realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 170.636.311.480,- atau 96,42 % terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.6.338.545.520,- (3,58 %), **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.64.760.000,- atau 86,35 % terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 10.240.000,- (13,65 %), dan **Program Penanganan Bencana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.115.488.000,- realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.086.409.950,- atau 98,63 % terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.29.078.050,- (1,37 %).

Keempat program tersebut menargetkan indikator kinerja di akhir RPJMD sebesar 2,37 % penurunan populasi



PPKS dan tercapai 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 232.133.449.000,- terealisasi anggaran sebesar Rp. 225.122.745.521,- atau 95,05 % terdapat efisiensi sebesar Rp.7.010.703.479,- (4,95 %).

Tujuan kedua meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dengan sasaran strategis meningkatnya peran PSKS dalam UKS, ada 2 (dua) program yang mendukung, yaitu: **Program Pemberdayaan Sosial** menargetkan indikator kinerja sebesar 34,38 % realisasi tercapai 36,59 %, peningkatan peran PSKS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.529.040.000- realisasi fisik 106,43 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.479.887.500,- atau 99,35 % terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 49.152.500.- (0,65 %), dan **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 432.000.000,- realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 431.960.000,- atau 99,99 % terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 40.000,- (0,01 %).

Tujuan ketiga meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan sasaran strategis 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan 2) meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran strategis **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.451.994.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.120.403.054.829,- atau 98,49 % terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.5.048.939.171,- atau 1,51 %.

Program penunjang urusan pemerintah daerah mendukung 2 (dua) sasaran strategis pada indikator kinerja Dinas Sosial yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah, alokasi anggaran pada kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 938.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 928.782.424,- atau 98,96 %



terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.717.576,- (1,04 %). Sedangkan sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan alokasi anggaran pada kegiatan Administrasi Umum Kepegawaian dan Administrasi Keuangan. Anggaran pada Administrasi Umum Kepegawaian sebesar Rp.25.866.172.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.25.607.209.994,- atau 99 % terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.258.962.006,- (1 %), dan Administrasi Keuangan sebesar Rp.99.585.822.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.94.795.844.835,- atau 95,19% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.4.789.977.165,- (4,81%). Kedua kegiatan tersebut terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.5.048.939.171,- atau 2,91 %.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berikut tabel analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.8
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Menurunkan Populasi PPKS	Persentase penanganan PPKS	2,37	• Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti	2,37	Menunjang



Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS yang ditangani	Persentase PPKS ditangani yang meningkat kesejahteraannya sosialnya	100	1. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	1.250 Orang	Menunjang
			2. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti,	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	2.000 orang	Menunjang
			3. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti,	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	8.500 orang	Menunjang
			4. Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di dalam panti,	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti	10.500 orang	Menunjang
			• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	8,21	Menunjang



				1. Kegiatan pengangkatan anak kantar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.	Persentase rekomendasi pengangkatan yang diterbitkan	100	Menunjang
				2. Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	Jumlah Fakir Miskin yang tervalidasi untuk mendapatkan perlindungan dari Jaminan Sosial	63.820 orang	Menunjang
				• Program Penanganan WN Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	Menunjang
				1. Kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal.	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota asal	100	Menunjang
				• Program Penanganan Bencana	Persentase korban Bencana Alam dan Sosial	100	Menunjang



					yang mendapatkan penanganan		
				1. Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100	Menunjang
					Persentase korban bencana sosial yang ditangani	100	Menunjang
2.	Meningkatkan Peran PSKS	Persentase peningkatan kapasitas bagi PSKS	34,38	• Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	36,59	Menunjang
	Meningkatnya Kemampuan PSKS yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan setelah mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	106,43	1. Kegiatan peningkatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, 2. Kegiatan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial.	Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	11.029 orang	Menunjang
				• Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui undian hadiah	200 orang	Tidak Menunjang
					Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola	100	Tidak Menunjang
				1. Kegiatan kepahlawanan keperintisan dan	Jumlah Taman Makam Pahlawan	1 Unit	Tidak Menunjang



				kesetiakawanan sosial.	Nasional Provinsi yang dikelola		
3.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : 	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,50	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	2 dok	Menunjang
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	88	<ol style="list-style-type: none"> Administrasi keuangan Perangkat Daerah Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi umum Perangkat Daerah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan PD Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian PD Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum PD Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang 	<p>1 dok</p> <p>1 dok</p> <p>1 dok</p> <p>1 dok</p>	<p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p>



				pemerintah daerah	urusan pemerintah daerah		
				5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	5. Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 dok	Menunjang
				6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	6. Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	1 dok	Menunjang

Program dan kegiatan yang menunjang atau tidak menunjang dalam capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

Tujuan 1 Menurunkan Populasi PPKS dengan sasaran Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS yang ditangani dan indikator kinerja presentase penanganan PPKS, ada 4 (empat) program pendukung yaitu **Program Rehabilitasi Sosial** dengan indikator kinerja persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti sebesar 2,37 % realisasi tercapai 100 % dan kegiatannya meliputi kegiatan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti 1.250 orang, kegiatan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar



di dalam panti dengan jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti 2.000 orang, kegiatan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti dengan jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti 8.500 orang dan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di dalam panti dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti 10.500 orang.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 8,21 % tercapai sesuai target yaitu sebesar 8,21 % atau realisasinya 100 % dengan kegiatan yang mendukung kegiatan pengangkatan anak kantar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal indikator kegiatan persentase rekomendasi pengangkatan yang diterbitkan target 100 % realisasi capaiannya 100 % dan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi dengan indikator kegiatannya jumlah fakir miskin yang tervalidasi untuk mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial sebanyak 287.480 orang realisasinya sesuai dengan target 287.480 orang atau 100 %. Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi melalui pemberian bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) atas usulan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, tahun 2023 sebanyak 63.820 orang menerima bantuan.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan memiliki 1 indikator yaitu presentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan target 100 % dan realisasi capaiannya 100 % kegiatan yang mendukung Kegiatan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah



provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal dengan indikator kegiatan persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota asal tercapai 100 %.

Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerjanya persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan target 100 % realisasinya 100 %, kegiatan yang mendukung perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi dan indikator kegiatannya persentase korban bencana alam yang ditangani tercapai 100 % dan persentase korban bencana sosial yang ditangani juga tercapai 100 %.

Tujuan 2 Meningkatkan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan sasaran strategis Meningkatkan kemampuan PSKS yang mendapatkan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan indikator kinerja persentase peningkatan kapasitas bagi PSKS target sebesar 34,38 % realisasi 36,59 %, ada 2 (dua) program namun hanya 1 (satu) yang mendukung yaitu **Program Pemberdayaan Sosial** yang memiliki 1 indikator dengan capaian sangat tinggi (106,43 %) melebihi target kinerja. Kegiatan yang mendukung kegiatan peningkatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan indikator kegiatannya jumlah PSKS yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas sebanyak 11.029 orang dan tercapai 106,43 %, dan kegiatan penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi, yang mendapatkan peningkatan kapasitas melalui undian berhadiah sebanyak 200 orang realisasinya 100 %.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan tidak termasuk program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja Dinas Sosial meskipun program dan kegiatannya memiliki 1 indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi



(100 %) sesuai target, yaitu persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan. Kegiatan kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial dengan indikator kegiatannya jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola sebanyak 1 unit Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN Giri Tunggal Semarang).

Tujuan 3 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan sasaran strategis 1). meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah, kegiatan pendukung yaitu perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi 106,88 % melebihi target nilai RPJMD sebesar 80 realisasi 85,50, kegiatan yang mendukung perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kegiatannya jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun 2 dokumen. 2). meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja nilai kepuasan masyarakat, kegiatan pendukungnya yaitu administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah memiliki tingkat ketercapaian nilai indek kepuasan masyarakat tinggi sesuai target nilai dalam RPJMD sebesar 88 dan realisasinya tercapai 88 atau 100 %.



3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp.366.484.983.000,- (Tiga ratus enam puluh enam milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, rincian penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1.9
Realisasi Anggaran

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.390.494.000	121.331.837.253	95,99
2.	Program Pemberdayaan Sosial	7.529.040.000	7.479.887.500	99,35
3.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	432.000.000	431.960.000	99,99
4.	Program Rehabilitasi Sosial	52.968.104.000	52.335.264.091	98,81
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	176.974.857.000	170.636.311.480	96,42
6.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	75.000.000	64.760.000	86,35
7.	Program Penanganan Bencana	2.115.488.000	2.086.409.950	98,63
JUMLAH TOTAL		366.484.983.000	354.366.430.274	96,51

Anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis dialokasikan sebesar Rp. 366.484.983.000,- dan realisasi sebesar Rp 354.366.430.274,- (96,51 %) dengan demikian terdapat efisiensi



penggunaan sumber daya sebesar Rp 12.118.552.726 atau 3,49 % dari pagu anggaran yang ditetapkan.

3.3 Inovasi

Inovasi-inovasi pelayanan publik di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sangat banyak, hampir disemua Panti Pelayanan Sosial dilingkungan Dinas Sosial mempunyai inovasi baik untuk mempermudah pelayanan kepada penerima manfaat di panti maupun dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Ada beberapa inovasi pelayanan publik yang ikut dalam penilaian Inovasi Daerah (IGA) dan Inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), antara lain :

3.3.1 Si Jaring Ikan (PPS PGOT Mardi Utomo Semarang)

Inovasi Si Jaring Ikan Panti Pelayanan Sosial Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PPS PGOT) Mardi Utomo Semarang mendapat penghargaan Top 20 dari KIPP Jawa Tengah pada tanggal 22 Desember 2023. Dinas sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Informatif.

Si Jaring Ikan suatu langkah memberdayakan penerima manfaat, yang fokus pada penumbuhan kepercayaan diri, kreativitas dan motivasi untuk mengembangkan potensi melalui interaksi sosial. Dengan adanya Si Jaring Ikan penerima manfaat banyak mendapatkan penawaran pekerjaan. Dampak positifnya tidak hanya para penerima manfaat tapi juga berdampak pada SDM pegawai di PPS PGOT Mardi Utomo Semarang sebagai *Agen of Change* yang ikut dalam proses memperjuangkan, mengaktifkan dan mendukung implementasi pelayanan dan pengembangan masyarakat.



3.3.2 SIKS – DJ V2

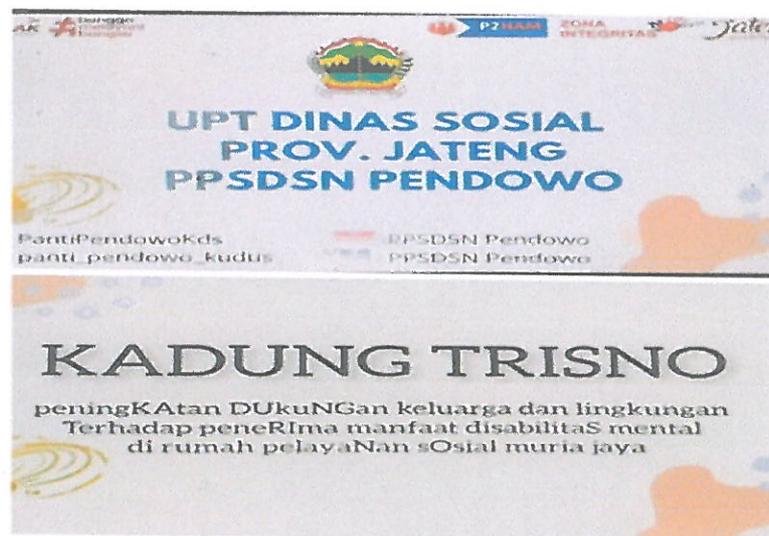
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (SIKS - DJ V2) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Sosial untuk mengintegrasikan berbagai layanan penyelenggaraan sosial di Jawa Tengah secara cepat, tepat, mudah, murah, efektif dan efisiensi dengan dukungan data yang valid dan mutakhir. Pengelolaan data PPKS, PSKS dan Penerima manfaat di Panti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, juga dilakukan melalui aplikasi ini, 1 (satu) aplikasi dengan berbagai macam modul.





3.3.3 KADUNG TRISNO (PPSDSN Pendowo Kudus)

Peningkatan Dukungan keluarga dan lingkungan Terhadap penerima manfaat disabilitas mental di rumah pelayanan sosial muria jaya (KADUNG TRISNO), memberikan dukungan kepada penerima manfaat (PM) di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Muria Kudus agar meminimalisir adanya stigmatisasi dan marginalisasi dari keluarga dan masyarakat lingkungan. Bentuk dukungan dapat berupa emosional, informasi (akses lapangan pekerjaan) dan dukungan instrumental yang melibatkan keluarga PM dan stakeholder terkait.

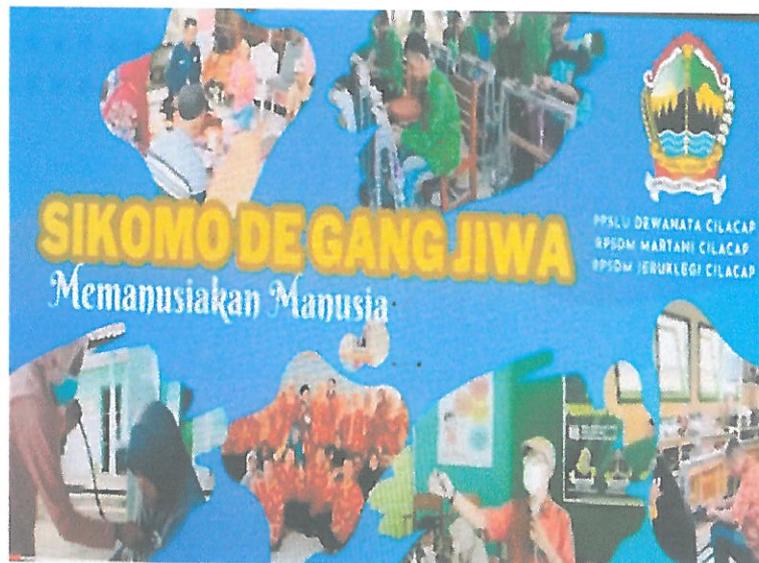


3.3.4. SIKOMO de GANG JIWA (PPSLU Dewanata Cilacap)

Sinergi Kolaborasi Memanusiakan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), berawal dari tingginya stigma negatif yang ditujukan kepada ODGJ dari masyarakat dan belum patuhnya ODGJ mengkonsumsi obat secara rutin. Peningkatan kualitas hidup ODGJ masih sulit dilakukan karena rendahnya pengetahuan ODGJ, keluarga dan masyarakat mengenai isu kesehatan jiwa serta antar stakeholder belum ada koordinasi dalam penanganan



kasus orang dengan gangguan jiwa. Dengan fakta penanganan ODGJ dilapangan terutama pasca pelayanan di dalam panti yang sering diminta merujuk kembali ke dalam panti, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi dalam penanganan ODGJ.



3.4 Penghargaan

3.4.1 Penghargaan Tingkat Nasional

Penghargaan Peran dan Kontribusi dalam Penanganan Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, diberikan kepada Tagana Provinsi Jawa Tengah ikut peduli dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Penyerahan penghargaan oleh Menteri Sosial RI di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Mei 2023.



Menteri Sosial RI berikan penghargaan kepada Tagana Provinsi Jawa Tengah





Penghargaan Inovasi Mitigasi Penanaman Mangrove di Kabupaten Kebumen diberikan kepada Bapak Kamsi Tagana Kabupaten Kebumen sebagai pioneer dalam inovasi mitigasi penanaman mangrove di pantai Ayah Kebumen. Penyerahan penghargaan oleh Menteri Sosial RI di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Mei 2023.





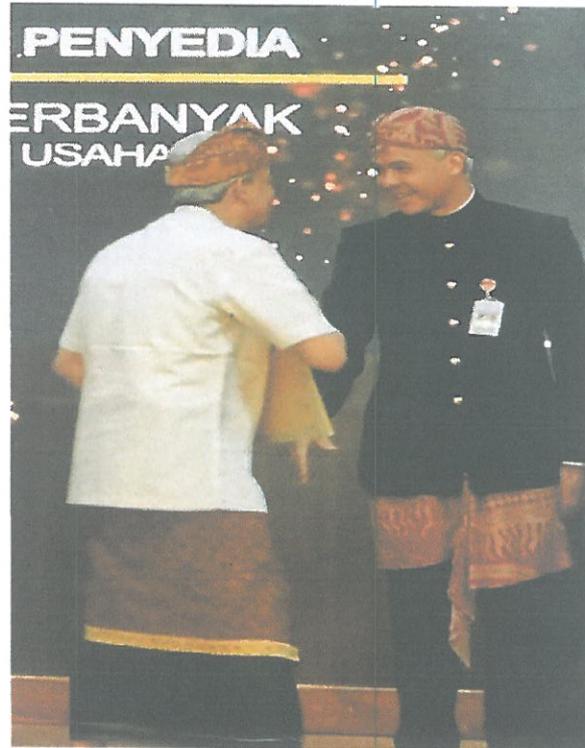
3.4.2 Penghargaan Tingkat Provinsi

Penghargaan Bendahara Teladan Katagori Call for Paper Tahun 2023, peningkatan inovasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Penyerahan penghargaan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 30 Mei 2023.





Penghargaan Blangkon Jawa Tengah Katagori SKPD Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan Presentase Tertinggi Partisipan Program Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah Terbaik Tahun 2023. Penyerahan penghargaan oleh Gubernur Jawa Tengah di Solo pada tanggal 6 September 2023.





Penghargaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Kenaikan Penerapan dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tertinggi Tahun 2023. Penyerahan penghargaan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 25 Oktober 2023.



Dinsos Prov. Jateng memperoleh penghargaan sebagai SKPD dengan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terbaik.





Penghargaan Badan Publik SKPD di Provinsi Jawa Tengah Katagori Badan Publik Informatif Tahun 2023. Penyerahan penghargaan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 21 Desember 2023.





BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah salah satu aktornya adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial.
2. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target dan sasaran kinerja Dinas Sosial yaitu program rehabilitasi sosial dengan memberikan bantuan SOSH permakanan di LKS/LKSA dan rehabilitasi sosial dalam Panti Pemerintah, program perlindungan dan jaminan sosial melalui kegiatan pengangkatan anak, pengolahan data fakir miskin dan memberikan bantuan sosial PPKS non produktif (KJS, DBHCHT dan DID), program penanganan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial, program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dengan memfasilitasi pemulangan orang terlantar (OT), program pengelolaan taman makam pahlawan dalam bentuk penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial serta program pemberdayaan sosial melalui peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Target dan realisasi kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dari hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tercapai 103,29 % dengan katagori **Sangat Baik**, rincian per sasaran sebagai berikut :



- a. Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator kinerja persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) target 2,37 % tercapai 100 %;
 - b. Meningkatkan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan indikator kinerja persentase peningkatan kapasitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) target 34,38 % realisasi 36,59 % atau tercapai 106,43 %;
 - c. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan indikator kinerja
 - 1). Nilai SAKIP Perangkat Daerah target 80 tercapai nilai 85,50 atau 106,88 %;
 - 2). Nilai Indek Kepuasan Masyarakat tercapai target 88 tercapai 88 atau 100 % ;
4. Keberhasilan capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sangat baik tidak terlepas dari komitmen seluruh jajaran baik struktural maupun pelaksana yang mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah, juga adanya dukung dari sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana yang efektif dan efisien.
5. Permasalahan dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, antara lain :
- a. Belum optimalnya pelayanan sosial dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan keterpaduan penanganan PPKS antar pemerintah dan stakeholder.;
 - b. Belum optimalnya validasi data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PPKS lainnya;



- c. Belum semua Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) mampu melaksanakan perannya dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
6. Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mendapatkan 2 penghargaan tingkat nasional yaitu Penghargaan Peran dan Kontribusi dalam Penanganan Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan Penghargaan Tagana Jawa Tengah dalam Inovasi Mitigasi Penanaman Mangrove di Kabupaten Kebumen, disamping itu juga memperoleh 4 penghargaan tingkat provinsi yaitu Penghargaan Bendahara Teladan Katagori Call for Paper Tahun 2023 dalam peningkatan inovasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Penghargaan Blangkon Jawa Tengah Katagori SKPD Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan Presentase Tertinggi Partisipan Program Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah Terbaik Tahun 2023, Penghargaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Kenaikan Penerapan dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tertinggi Tahun 2023, dan Penghargaan Badan Publik SKPD di Provinsi Jawa Tengah Katagori Badan Publik Informatif Tahun 2023.
7. Tindaklanjut hasil evaluasi laporan SAKIP Tahun 2022 sudah ditindaklanjuti pada :
 - a. Surat Nomor 050 /1535 tanggal 12 September 2023 Hal Rekomendasi Hasil Evaluasi atas SAKIP Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, diterima Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 September 2023.
 - b. Surat Nomor 050 / 1856 tanggal 15 November 2023 Hal Laporan Progres Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, diterima Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tanggal 17 November 2023.



4.2 Rekomendasi

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial di masa mendatang antara lain :

- 1). Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam panti yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial.
- 3). Pemenuhan jaminan sosial bagi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran.
- 4). Peningkatan kemandirian sosial PPKS yang berkelanjutan.
- 5). Peningkatan peran serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 6). Pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana yang memenuhi SPM bidang sosial.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja yang akan datang.

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. IMAM MASKUR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690512 199401 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS SOSIAL

Jl. Pahlawan Nomor 12 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024 – 8311729
Faksimile 024 – 8450704 e-mail dinsos@jatengprov.go.id
Website <http://dinsos.jatengprov.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. IMAM MASKUR, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Drs. NANA SUDJANA, MM

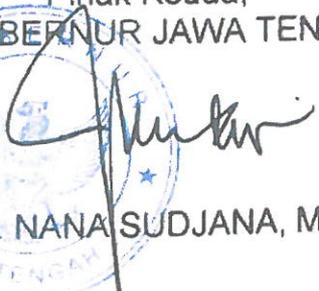
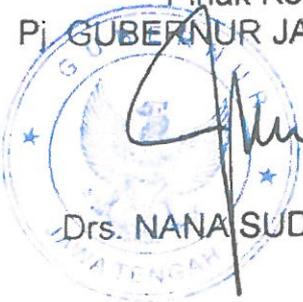
Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Tengah.

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

Drs. NANA SUDJANA, MM


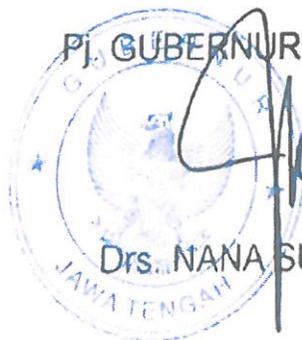
Semarang, November 2023

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. IMAM MASKUR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690512 199401 1 001

No 1	Program 2	Anggaran (Rp) 3	Keterangan 4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.390.494.000	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	7.529.040.000	APBD
3.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	432.000.000	APBD
4.	Program Rehabilitasi Sosial	52.968.104.000	APBD
5.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	176.974.857.000	APBD
6.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	75.000.000	APBD
7.	Program Penanganan Bencana	2.115.488.000	APBD

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM

Semarang, November 2023
 KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. IMAM MASKUR, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690512 199401 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2023
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
4	PENDAPATAN DAERAH	197.741.000	194.092.300	98,15	3.648.700
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	197.741.000	194.092.300	98,15	3.648.700
4.1.2	Retribusi Daerah	197.741.000	194.092.300	98,15	3.648.700
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	197.741.000	194.092.300	98,15	3.648.700
4.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175.741.000	171.067.300	97,34	4.673.700
4.1.2.2.1.1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	8.500.000	8.500.000	100	0
4.1.2.2.1.2	Retribusi Penyewaan Tanah	100.471.000	97.247.300	96,79	3.223.700
4.1.2.2.1.3	Retribusi Penyewaan Bangunan	29.520.000	28.070.000	95,09	1.450.000
4.1.2.2.1.5	Retribusi Pemakaian Ruangan	37.250.000	37.250.000	100	0
4.1.2.2.6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	22.000.000	23.025.000	104,66	(1.025.000)
4.1.2.2.6.1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	22.000.000	23.025.000	104,66	(1.025.000)
	Jumlah Pendapatan	197.741.000	194.092.300	98,15	3.648.700
5	BELANJA DAERAH	118.872.309.000	113.941.935.214	95,85	4.930.373.786
5.1	BELANJA OPERASI	118.859.809.000	113.929.435.214	95,85	4.930.373.786
5.1.1	Belanja Pegawai	98.970.022.000	94.183.929.813	95,16	4.786.092.187
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	43.127.473.000	40.874.750.284	94,78	2.252.722.716
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	31.364.894.000	30.775.152.699	98,12	589.741.301
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	30.997.048.000	30.419.172.699	98,14	577.875.301
5.1.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	367.846.000	355.980.000	96,77	11.866.000
5.1.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	3.014.705.000	2.712.953.320	89,99	301.751.680
5.1.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2.977.921.000	2.698.654.790	90,62	279.266.210
5.1.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	36.784.000	14.298.530	38,87	22.485.470
5.1.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	1.280.000.000	703.150.000	54,93	576.850.000
5.1.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1.280.000.000	703.150.000	54,93	576.850.000
5.1.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.209.270.000	1.104.670.000	91,35	104.600.000
5.1.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.154.070.000	1.067.710.000	92,52	86.360.000
5.1.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	55.200.000	36.960.000	66,96	18.240.000
5.1.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	988.945.000	953.350.000	96,40	35.595.000
5.1.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	988.945.000	953.350.000	96,40	35.595.000
5.1.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.789.777.000	1.608.158.520	89,85	181.618.480
5.1.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.660.911.000	1.594.181.460	95,98	66.729.540
5.1.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	128.866.000	13.977.060	10,85	114.888.940
5.1.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	221.432.000	149.948.406	67,72	71.483.594
5.1.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	221.432.000	149.948.406	67,72	71.483.594
5.1.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	448.000	378.666	84,52	69.334
5.1.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	416.000	372.554	89,56	43.446
5.1.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	32.000	6.112	19,10	25.888
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.964.159.000	2.614.458.344	88,20	349.700.656
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.933.407.000	2.598.168.809	88,57	335.238.191
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	30.752.000	16.289.535	52,97	14.462.465
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	73.460.000	63.132.575	85,94	10.327.425
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	72.578.000	62.278.175	85,81	10.299.825
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	882.000	854.400	96,87	27.600
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	220.383.000	189.397.754	85,94	30.985.246
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	217.735.000	186.834.674	85,81	30.900.326
5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.648.000	2.563.080	96,79	84.920
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	54.773.349.000	52.264.489.529	95,42	2.508.859.471
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	49.577.898.000	47.778.270.256	96,37	1.799.627.744

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	49.577.898.000	47.778.270.256	96,37	1.799.627.744
5.1.1.2.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.195.451.000	4.486.219.273	86,35	709.231.727
5.1.1.2.3.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	5.195.451.000	4.486.219.273	86,35	709.231.727
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.069.200.000	1.044.690.000	97,71	24.510.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	1.069.200.000	1.044.690.000	97,71	24.510.000
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.044.720.000	1.020.210.000	97,65	24.510.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24.480.000	24.480.000	100	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.889.787.000	19.745.505.401	99,27	144.281.599
5.1.2.1	Belanja Barang	1.475.749.000	1.471.231.200	99,69	4.517.800
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	1.475.749.000	1.471.231.200	99,69	4.517.800
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	413.000.000	413.000.000	100	0
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.300.000	2.300.000	100	0
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	233.159.000	231.645.500	99,35	1.513.500
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	155.420.000	155.419.800	100	200
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	54.000.000	51.152.400	94,73	2.847.600
5.1.2.1.1.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	33.200.000	33.200.000	100	0
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	100.000.000	99.958.500	99,96	41.500
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	359.670.000	359.655.000	100	15.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	125.000.000	124.900.000	99,92	100.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	14.188.375.000	14.106.194.607	99,42	82.180.393
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	13.221.600.000	13.164.536.002	99,57	57.063.998
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	138.400.000	138.400.000	100	0
5.1.2.2.1.20	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	11.583.000.000	11.535.847.000	99,59	47.153.000
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	433.000.000	428.193.585	98,89	4.806.415
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	433.000.000	432.738.972	99,94	261.028
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.200.000	4.200.000	100	0
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	110.000.000	106.474.416	96,79	3.525.584
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	8.000.000	7.738.300	96,73	261.700
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	462.000.000	460.998.729	99,78	1.001.271
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.000.000	49.945.000	99,89	55.000
5.1.2.2.2	Belanja luran Jaminan/Asuransi	896.475.000	872.290.605	97,30	24.184.395
5.1.2.2.2.5	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	613.475.000	592.843.145	96,64	20.631.855
5.1.2.2.2.6	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	39.000.000	36.599.552	93,85	2.400.448
5.1.2.2.2.7	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	49.000.000	48.338.858	98,65	661.142
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	195.000.000	194.509.050	99,75	490.950
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.300.000	69.368.000	98,67	932.000
5.1.2.2.4.117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	70.300.000	69.368.000	98,67	932.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	1.902.140.000	1.880.439.214	98,86	21.700.786
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	882.140.000	863.422.214	97,88	18.717.786
5.1.2.3.2.36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	425.000.000	407.469.100	95,88	17.530.900
5.1.2.3.2.117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	110.000.000	109.965.000	99,97	35.000
5.1.2.3.2.120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	103.140.000	103.117.864	99,98	22.136
5.1.2.3.2.123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	244.000.000	242.870.250	99,54	1.129.750

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.020.000.000	1.017.017.000	99,71	2.983.000
5.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.020.000.000	1.017.017.000	99,71	2.983.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.323.523.000	2.287.640.380	98,46	35.882.620
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.323.523.000	2.287.640.380	98,46	35.882.620
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.263.023.000	2.228.640.380	98,48	34.382.620
5.1.2.4.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000	3.000.000	66,67	1.500.000
5.1.2.4.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	56.000.000	56.000.000	100	0
5.2	BELANJA MODAL	12.500.000	12.500.000	100	0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000	12.500.000	100	0
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	12.500.000	12.500.000	100	0
5.2.2.10.2	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.500.000	12.500.000	100	0
5.2.2.10.2.3	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.500.000	12.500.000	100	0
	Jumlah Belanja	118.872.309.000	113.941.935.214	95,85	4.930.373.786
	Surplus/(Defisit)	(118.674.568.000)	(113.747.842.914)	95,85	(4.926.725.086)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(113.747.842.914)	100	113.747.842.914



 Semarang, 31 Desember 2023
 PPK - Dinas Sosial
 (DENY PURNAMANINGRUM, SE, Akt)
 NIP. 19800630 200903 2 006